

**PERAN GERAKAN #METOO PADA KEBIJAKAN KOREA
SELATAN TENTANG PELECEHAN DAN KEKERASAN
SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional**



oleh:

Yuniar Rizky Pratiwi

NIM I92219097

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuniar Rizky Pratiwi

NIM : 192219097

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Peran Gerakan #MeToo Pada Kebijakan Korea Selatan
tentang Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 8 Juni 2023

Yang Menyatakan

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MEYELA TAMPIL' and 'F014ZAKX5580 2533'. To the left of the stamp, there is a vertical stamp with the text 'UNIVERSITAS' and '192219097'.

Yuniar Rizky Pratiwi

192219097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yuniar Rizky Pratiwi

NIM : 192219097

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **Peran Gerakan #MeToo Pada Kebijakan Korea Selatan tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 8 Juni 2023

Pembimbing



Dra. Hj. Wahidah Zein Br Siregar, M.A, Ph.D

NIP 196901051993032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Yuniar Rizky Pratiwi dengan judul : "Peran Gerakan #MeToo pada Kebijakan Korea Selatan tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dra. Hj. Wahidah Zein Br Siregar, MA, Ph.D.
NIP. 196901051993032001

Penguji II



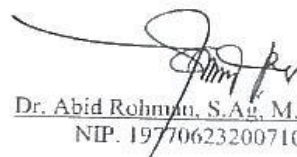
Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQR.
NIP. 198408232015031002

Penguji III



Zudan Rosyidi, SS, MA.
NIP. 197803152003121004

Penguji IV




Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I.
NIP. 197706232007101006

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uisu.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuniar Rizky Pratiwi.....
NIM : 192219097.....
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional.....
E-mail address : yuniarrizky0206@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

“PERAN GERAKAN #METOO PADA KEBIJAKAN KOREA
SELATAN TENTANG PELECEHAN DAN KEKERASAN
SEKSUAL”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2023

Penulis

(Yuniar Rizky Pratiwi)

ABSTRACT

Yuniar Rizky Pratiwi, 2023. *The Role of the #MeToo Movement on South Korea's Policy on Sexual Harassment and Violence.*

This research discusses the role of the #MeToo movement in changing legal policies that apply to violence and sexual harassment in South Korea. This research used descriptive qualitative research methods. To collect the data, researchers conducted a documentation on the official website of the South Korean government and several associations in South Korea. The researcher founded that the #MeToo movement was able to make the South Korean government propose several draft laws related to cases of sexual violence and harassment and also add maximum penalties and fines to further create a deterrent effect for perpetrators of sexual violence and harassment.

Keywords : *#MeToo Movement, Sexual Violence, Sexual Harassment, and South Korea.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran gerakan #MeToo dalam mengubah kebijakan hukum yang berlaku terkait kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan dokumentasi terhadap website resmi pemerintah Korea Selatan dan beberapa asosiasi di Korea Selatan. Peneliti kemudian menemukan jika gerakan #MeToo mampu membuat pemerintah Korea Selatan mengusulkan beberapa RUU terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual dan menambahkan maksimal hukuman dan denda untuk semakin membuat efek jera bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual.

Kata Kunci : *Gerakan #MeToo, Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual, Korea Selatan*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR GRAFIK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Tinjauan Pustaka | 13 |
| F. Argumentasi Utama | 23 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 24 |
| BAB II LANDASAN KONSEPTUAL | 26 |
| A. Definisi Konseptual | 26 |
| B. Landasan Konseptual | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 43 |
| B. Waktu Penelitian | 44 |
| C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa | 45 |
| D. Level Analisis | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| F. Teknik Analisa Data..... | 46 |
| G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 48 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 51 |
| A. Gerakan #MeToo di dunia Internasional..... | 51 |
| B. Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan | 56 |
| C. Perkembangan Gerakan #MeToo di Korea Selatan | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1 : Tweet Alyssa Milano tentang #MeToo pada tahun 2017 | 2 |
| Gambar 1. 2: Demonstran pendukung gerakan #MeToo pada tahun 2018..... | 8 |
| Gambar 4. 1: Pengakuan Jaksa Seo Ji-Hyun di kanal berita JTBC terkait pelecehan seksual yang pernah Ia terima..... | 66 |
| Gambar 4. 2: Opini Publik tentang Gerakan #MeToo dalam melawan isu Pelecehan dan Penyerangan Seksual..... | 72 |
| Gambar 4. 3: Aksi protes masyarakat sipil yang mendukung gerakan #MeToo dan menolak diskriminasi yang dialami perempuan di Korea Selatan | 76 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|---|
| Grafik 1. 1: Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Korea Selatan pada tahun 2018... | 5 |
|---|---|

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan #MeToo hadir di dunia Internasional untuk memerangi isu kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi kepada banyak perempuan di dunia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pada tahun 2022 diperkirakan 736 juta wanita dari total 3,905 miliar wanita di dunia pernah mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.¹ Dengan kata lain, hampir 1 dari 3 perempuan di dunia telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan maupun non-pasangan mereka.

Pada tahun 2018, negara yang memiliki tingkat pelecehan seksual yang sangat tinggi untuk wanita berusia 18-34 tahun adalah Meksiko, Irlandia, dan Australia dengan persentase masing-masing sebanyak 43%, 32%, 29%.² Dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini terdapat banyak dampak buruk bagi korban yang mengalaminya. Dalam hal fisik misalnya, luka memar di tubuh dan alat kelamin, infeksi menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Ada pula konsekuensi psikologis yaitu depresi, kecemasan, dan pikiran untuk bunuh diri.³

¹ UN WOMEN, "Facts and Figures: Ending Violence against Women," last modified 2022, <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>, Accessed 4 Oktober 2022.

² Win World Survey (WWS), "WIN World Survey (WWS) Ranks 40 Countries on Gender Equality, Sexual Harassment and Violence," (WWS), *Win World Survey* (2018): 28, http://www.winmr.com/wp-content/uploads/2019/03/WIN_2018_Gender-Equality.pdf.

³ Stephanie Kewley and Charlotte Barlow, *Preventing Sexual Violence: Problems and Possibilities* (Bristol University Press, 2020), 1-2.

54,454 suka dari ribuan wanita dari berbagai negara yang memiliki pengalaman pelecehan seksual yang sama.⁴ Karena begitu meluasnya tagar #MeToo ini menyebabkan diskusi mengenai pelecehan seksual telah didorong pada tingkat yang lebih luas yaitu dalam wacana nasional dan internasional. Sejak itu, gerakan #MeToo telah menyebar luas ke berbagai negara di dunia untuk memberikan bantuan kepada para penyintas pelecehan seksual dan mendorong para korban untuk berbicara, setelah sebelumnya tidak mempunyai ruang untuk menyampaikan semua hal tersebut.⁵

Gerakan #MeToo ini sampai di Korea Selatan karena penyebarannya yang cepat lewat media sosial. Gerakan tersebut mulai berkembang di Korea Selatan sejak bulan Januari tepatnya pada 29 Januari 2018. Gerakan ini dimulai oleh pengakuan seorang Jaksa bernama Seo Ji-hyun yang mengalami pelecehan seksual oleh atasannya atau jaksa senior bernama Ahn Tae-Gun sewaktu di wawancarai oleh salah satu kanal berita JTBC.⁶ Pengakuan jaksa Seo Ji-Hyun kemudian memicu gelombang aksi oleh para wanita yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Pada masyarakat yang patriarki, gerakan #MeToo membantu masyarakat untuk mengungkap betapa seriusnya seksisme dan pelecehan seksual yang dihadapi perempuan Korea Selatan di semua lapisan

⁴ Zurayda Enggar Kusuma, "Transnational Advocacy Network Strategies Of #Metoo Movement In Influencing The Policy Change Regarding The Issue Of Sexual Harassment In South Korea" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 27.

⁵ Ibid.

⁶ Chang May Choon, "High-Profile #MeToo Case in South Korea Throws the Spotlight on Attitudes towards Women in the Country."

masyarakat. Pengakuan Seo Ji-Hyun ini lantas memicu rentetan pengakuan banyak wanita yang telah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang dulu tidak mampu mereka laporkan.

Acara publik pertama dari gerakan #MeToo ini berlangsung selama dua hari berturut-turut pada tanggal 22 dan 23 Maret di pusat kota Seoul. Acara ini membuat para wanita berbicara selama 2018 menit mengenai pelecehan dan kekerasan seksual yang pernah mereka alami. Sedangkan bagi para wanita yang tidak mampu atau tidak siap untuk berbicara di atas panggung, telah disediakan sebuah dinding untuk memberi catatan atau pesan tertulis tentang pengalaman mereka.⁷

Kasus kekerasan seksual di Korea Selatan ini memang menjadi salah satu isu yang sudah lama dihadapi oleh negara tersebut. Dimana karena isu pelecehan dan kekerasan seksual ini menyebabkan perempuan di Korea Selatan sejak lama berusaha untuk membela diri. Mereka juga menuntut agar suara mereka didengar. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh laman resmi indikator pemerintah Korea Selatan, pada tahun 2020 tingkat kejahatan kekerasan seksual per 100.000 penduduk di Korea Selatan adalah sebanyak 58,1. Temuan ini menunjukkan bahwa secara statistik, persentase kejahatan pelecehan seksual berada di tingkat yang mengkhawatirkan. Jumlah keseluruhan serangan seksual di Korea Selatan telah meningkat pesat selama dekade terakhir.⁸

⁷ Linda Hasunuma and Ki young Shin, “#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou,” *Journal of Women, Politics and Policy* 40, no. 1 (2019): 97–111.

⁸K-indicator Sistem, “Tingkat Kriminalitas,” 2020, <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4262>, Accessed 11 Oktober 2020.

di Twitter Korea Selatan.¹⁹ Jumlah tersebut sangat banyak jika dibandingkan dengan Jepang, dimana penyebutan kata 'Me Too' hanya sekitar 1200 kali dalam satu hari dan dengan jumlah total pencarian per tahun melebihi 60.000.²⁰

Hal tersebut membuat gerakan #MeToo di Korea Selatan menjadi salah satu gerakan #MeToo yang memiliki dampak signifikan jika dibandingkan dengan negara lainnya yang juga melakukan kampanye sosial yang serupa. Korea Selatan memiliki kemudahan penyebaran gelombang gerakan #MeToo ini karena media yang juga terbuka dan mendukung. Perhatian media terhadap gerakan dan keinginan untuk menindaklanjuti kasus-kasus itu sangatlah kuat. Bahkan bagi masyarakat yang tidak terlalu tertarik pun, gerakan #MeToo sudah menjadi topik hangat.²¹

Gerakan #MeToo ini menunjukkan bahwa kebijakan Korea Selatan dalam mendukung korban yang menderita kekerasan seksual dan penanganan kasus terkait tidak berjalan dengan baik. Hukuman dan denda yang diterima pelaku pun belum banyak mengikat dan membuat jera untuk tidak melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Tidak terdapat kebijakan yang dapat menyeret pelaku kekerasan seksual yang lebih mempunyai kuasa dan kekuatan dibanding para korbannya.²² Sehingga, terlihat bahwa

¹⁹ Hong Ji In, "The Most Tweeted Word in the Domestic Social Sector This Year Is 'School Me Too.'"

²⁰ PR Times. 2018, "English Word of the Year for 2018, 'Me Too.'"

²¹ Inger Helene Johnsen Blegerberg, "#MeToo in South Korea and Japan – a Comparative Study of Newspapers' Coverage of the MeToo-Movement in South Korea and Japan" (University of Oslo, 2020), 51.

²² Kim Hae Sun, "The #MeToo Movement Reveals the Limits of Sexual Violence Prevention Policy."

pemerintah dan masyarakat di Korea Selatan masih bungkam tentang kekerasan seksual yang bisa dialami siapa saja dalam kehidupan sehari-hari, seperti di tempat kerja dan sekolah.

Gerakan #MeToo di Korea Selatan kemudian menjadi relevan di bahas dalam kajian Hubungan Internasional karena penyebaran dari gerakan tersebut yang massif baik secara *online* dan *offline*. Hal tersebutlah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam negara tersebut. Ini karena batas-batas yang memisahkan negara dunia di era globalisasi semakin kabur dan kurang relevan. Gerakan transnasional seperti gerakan #MeToo dapat terjadi di berbagai negara meskipun awalnya berasal dari Amerika. Dalam kajian Hubungan Internasional yang melihat peran negara sebagai aktor dalam politik dunia, penggunaan #MeToo di Korea Selatan menunjukkan bahwa aktor dalam politik dunia bisa juga merupakan aktor-aktor non-negara. Salah satunya yaitu gerakan massif seperti gerakan #MeToo ini.

Ledakan besar dari Gerakan #MeToo tersebut, membuat pemerintah Korea Selatan semakin merasa terdesak untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi korban. Pemerintah akhirnya membuat janji untuk mengeluarkan sistem baru dan prinsip yang telah diperbarui. Penciptaan sistem hukum baru oleh beberapa aktor ini akan memperkuat legitimasi bagi korban untuk melaporkan dan memastikan mereka dilindungi di bawah

aturan hukum, denda dan konsekuensi lain di bawah produk hukum.²³ Ini menunjukkan bahwa Gerakan #MeToo mampu mempengaruhi Pemerintah Korea Selatan untuk mengusulkan pedoman baru dan reformasi organisasi untuk menangani klaim kekerasan seksual.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah:

Bagaimana peran gerakan #MeToo dalam perubahan kebijakan pelecehan dan kekerasan seksual Korea Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran dari Gerakan #MeToo terhadap perubahan kebijakan kekerasan dan pelecehan seksual Korea Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian bersifat akademis maupun manfaat praktis. Berikut ini adalah penjelasan dari manfaat-manfaat tersebut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mereka yang ingin meneliti tentang Gerakan sosial transnasional yang dilakukan melalui media sosial.

²³ Zurayda Enggar Kusuma, "Transnational Advocacy Network Strategies Of #Metoo Movement In Influencing The Policy Change Regarding The Issue Of Sexual Harassment In South Korea," 41.

membahas mengenai pengaruh Gerakan #MeToo dalam mempengaruhi kebijakan dalam merespon masalah pelecehan seksual di Amerika Serikat. Adanya gelombang besar dari Gerakan #MeToo membuat tekanan besar bagi pemerintah AS untuk mereformasi hukum terkait masalah kekerasan seksual ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini menggunakan negara Amerika Serikat dalam melihat pengaruh Gerakan #MeToo terhadap perubahan kebijakan yang ada di negara tersebut, sedangkan penelitian peneliti menggunakan Korea Selatan dalam meneliti dampak dari Gerakan #MeToo dalam melawan kekerasan dan pelecehan seksual yang ada di negara tersebut. Adapun persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama meneliti keberhasilan gerakan #MeToo dalam mengubah kebijakan di suatu negara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zurayda Enggar Kusuma dengan judul **Transnational Advocacy Network Strategies Of #Metoo Movement In Influencing The Policy Change Regarding The Issue Of Sexual Harassment In South Korea** pada tahun 2020 dalam bentuk Skripsi untuk ditujukan pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang.²⁵ Penelitian ini memaparkan strategi *Transnasional Advocacy Networks* dalam menjelaskan strategi advokasi yang dilancarkan gerakan #MeToo meliputi politik informasi, politik simbolik, politik leverage, dan politik akuntabilitas, yang pada akhirnya

²⁵ Zurayda Enggar Kusuma, "Transnational Advocacy Network Strategies Of #Metoo Movement In Influencing The Policy Change Regarding The Issue Of Sexual Harassment In South Korea."

berhasil meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memberikan perlindungan lebih kepada korban pelecehan seksual dengan mengeluarkan kebijakan baru. Penelitian ini fokus membahas kebijakan *Equal Employment Opportunity and Work-Family balance Assistance Act* (EEO Act) yang telah disahkan sejak tahun 1990-an untuk mencegah dan mengurangi tindakan pelecehan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya UU EEO ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kuatnya sistem patriarki dalam budaya Korea Selatan. Sehingga, strategi *Transnational Advocacy Networks* yang dipilih adalah untuk menjelaskan bagaimana gerakan #MeToo dapat mengadvokasi kebijakan pelecehan seksual di Korea Selatan. Perbedaan dari penelitian kedua ini yaitu terletak pada konsep yang digunakan. Penelitian peneliti menggunakan konsep *Transnational Social Movements* yang berfokus pada bagaimana gerakan #MeToo yang hanya sebuah gerakan masyarakat sipil dapat mencapai pemerintah pusat dan perhatian publik yang luas. Sedangkan penelitian Zurayda Enggar Kusuma menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* yang lebih fokus pada bagaimana gerakan #MeToo mendorong pemerintah dalam membuat kebijakan baru terkait kekerasan seksual. Kemudian, fokus dari kebijakan yang peneliti bahas pun berbeda. Jika penelitian ini lebih fokus pada UU EEO yang berbicara seputar kebijakan dalam lingkup ruang kerja, penelitian peneliti berfokus pada UU kekerasan seksual di tipe kekuasaan dengan ruang lingkup lebih luas seperti pendidikan, birokrasi, dan dunia hiburan.

Sedangkan persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama meneliti dampak gerakan #MeToo di Korea Selatan.

Penelitian ketiga adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Femy Triastia Hutabarat & Anggun Puspitasari dengan judul **Dampak Gerakan feminis Transnasional #MeToo terhadap Awareness perempuan India** pada tahun 2019²⁶. Penelitian ini membahas dampak dari Gerakan #MeToo terhadap kesadaran untuk memerangi kekerasan pada perempuan di India. Peneliti menjelaskan masih banyak perempuan di India yang masih belum menyadari betapa bahayanya kekerasan dalam rumah tangga dan mereka masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak dari pemerintah. Karena itu hadirnya Gerakan #MeToo ini kemudian berhasil memberikan pengaruh kepada masyarakat India tentang betapa pentingnya hukum dan kesadaran dalam memerangi dan meminimalkan peluang kekerasan terhadap perempuan di India. Penelitian ini memaparkan gambaran Gerakan #MeToo dalam rentang waktu tiga tahun yaitu dari 2017-2019 yang berhasil menjadi sebuah tren di India dalam meningkatkan kesadaran kaum perempuan India dalam menyuarakan hak-hak perempuan terhadap pemerintah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti ini terletak pada studi kasus negara penelitian yang digunakan. Jika penelitian ini menggunakan Gerakan #MeToo di India, penelitian peneliti menjelaskan Gerakan #MeToo di negara Korea Selatan. Sedangkan

²⁶ Femi Triastia Hutabarat and Anggun Puspitasari, "Dampak Gerakan Feminis Transnasional # MeToo Terhadap Awareness Perempuan India," *Balcony* 3, no. 2 (2019): 135–143.

persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama meneliti dampak gerakan #MeToo.

Penelitian keempat adalah jurnal penelitian karya Haldhianty Fitri Rakhmadhani, Sukma Sushanti, dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha yang berjudul **Upaya Gerakan #MeToo mengurangi kekerasan seksual pada perempuan di India Tahun 2018** pada tahun 2020²⁷. Penelitian ini membahas mengenai upaya Gerakan #MeToo dalam mengurangi jumlah pelecehan seksual di India khususnya pada tahun 2018. Salah satu bentuk penyebaran dari Gerakan #MeToo di India yaitu melalui kampanye media sosial yang berhasil meningkatkan kesadaran bagi masyarakat luas di India terkait masalah kekerasan seksual. Gerakan #MeToo ini telah mendorong pemerintah dan masyarakat luas untuk lebih memprioritaskan kasus.

Kekerasan seksual dengan tidak memberikan toleransi pada pelakunya. Upaya Gerakan #MeToo akhirnya membawa dampak baik karena banyak mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan jumlah laporan kekerasan seksual di India pada tahun 2018. Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian Haldhianty dan kawan-kawan memaparkan Gerakan #MeToo di negara India dan bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pola pikir masyarakat India terkait isu kekerasan seksual, sedangkan penelitian peneliti mengangkat fokus pada Gerakan #MeToo di

²⁷ Haldhianty Fitri Rakhmadhani, Sukma Sushanti, nd A.A Bagus Surya Widya Nugraha “Upaya Gerakan Me Too Mengurangi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di India Tahun 2018,” *Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2020): 1–10.

negara Korea Selatan. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti dampak yang telah diraih oleh gerakan #MeToo.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Safitri Minabari dengan judul **Strategi Gerakan #MeToo dalam melawan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di Korea Selatan** pada tahun 2021 dalam bentuk Skripsi untuk ditujukan pada program studi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang²⁸. Penelitian ini membahas mengenai Strategi Gerakan #MeToo dalam melawan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di Korea Selatan dengan melihat gambaran umum mengenai fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan di negara ini. Penelitian ini fokus pada konsep *Global Civil Society* digunakan dalam mengidentifikasi strategi penyebaran Gerakan #MeToo di Korea Selatan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini fokus pada bagaimana strategi Gerakan #MeToo hingga menyebar luas dan dapat melawan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di Korea Selatan. Sedangkan penelitian peneliti fokus melihat dampak yang dihasilkan dari Gerakan #MeToo terhadap kebijakan dan keadaan masyarakat setelah adanya Gerakan tersebut. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian adalah meneliti gerakan #MeToo di Korea Selatan.

²⁸ Eka Safitri Minabari, "Strategi Gerakan #MeToo Dalam Melawan Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Korea Selatan" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

Penelitian keenam adalah penelitian untuk thesis yang dilakukan oleh Inger Helene Johnsen Blegeberg dengan judul **#MeToo in South Korea and Japan – A comparative study of newspapers coverage of the #MeToo Movement in South Korea and Japan** pada tahun 2020²⁹. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Gerakan #MeToo global diterima, dirasakan dan dilaporkan oleh media di Korea Selatan dan Jepang dan bagaimana perbedaan gaya media di masing-masing negara mempengaruhi arus pergerakan Gerakan #MeToo ini. Media di Korea Selatan yang secara konsisten mengikuti semua kasus terkenal dan memberikan ruang bagi korban untuk berbicara ditambah adanya pergeseran politik di Korea Selatan yang memungkinkan Gerakan #MeToo ini mendapatkan dukungan secara politik untuk dapat berkembang secara luas. Pada akhirnya Gerakan #MeToo ini, juga memperoleh hasil yang lebih besar daripada Jepang karena adanya keterbatasan media dan tidak mendapat dukungan dari pemerintah yang masih dikuasai partai konservatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada konteks studi kasusnya. Pada penelitian Blegeberg fokusnya lebih pada bagaimana liputan surat kabar itu penting bagi penyebaran suatu Gerakan sosial. Sedangkan pada penelitian peneliti konteks studi kasusnya lebih luas yaitu mengenai bagaimana penyebaran Gerakan #MeToo tersebut dan apa saja dampaknya. Sedangkan

²⁹ Blegeberg, “#MeToo in South Korea and Japan – a Comparative Study of Newspapers’ Coverage of the MeToo-Movement in South Korea and Japan.”

persamaan dari kedua penelitian adalah meneliti tentang faktor apa saja yang dapat mendukung keberhasilan gerakan #MeToo di Korea Selatan.

Penelitian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Linda Hasunuma & Ki-young Shin dengan judul **#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou** tahun 2019³⁰. Penelitian ini membandingkan bagaimana Gerakan #MeToo di kedua negara Asia Timur yang saling bertetangga yaitu Korea Selatan dan Jepang. Keduanya memiliki persamaan budaya dimana sistem patriarki masih sangat mengakar dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Sehingga adanya Gerakan #MeToo ini merupakan fenomena baru dalam melawan sistem tersebut. Perbedaan mendasarnya adalah pada partisipasi keterlibatan perempuan dalam masyarakat dan sifat liputan media yang membuat dampak Gerakan #MeToo terhadap kedua negara itu menghasilkan output yang berbeda. Jika di Korea Selatan, dampak Gerakan #MeToo ini terlihat pada usaha pemerintah yang merevisi undang-undang tentang pelecehan seksuan dan kekerasan berbasis gender. Sedangkan di Jepang sendiri, dampak dari Gerakan #MeToo sendiri masih belum terlihat secara signifikan, karena masih terbatas pada sejumlah kecil kasus dan masih banyak perempuan yang lebih memilih *anonym* daripada menampakkan dirinya ke public. Sehingga pergerakan Gerakan #MeToo ini tumbuh lebih lambat. Dari penelitian tersebut, peneliti dapat mengetahui perbedaan arus Gerakan

³⁰ Hasunuma and Shin, “#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou.”

#MeToo antara Korea Selatan dengan negara tetangganya Jepang. Perbedaan penelitian Linda Hanasuma dan Ki Young Shin dengan penelitian peneliti adalah terletak pada fokus penelitian yang dipilih. Penelitian Linda Hanasuma dan Ki Young Shin fokus pada perbandingan arus Gerakan #MeToo di antara kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang, sedangkan penelitian peneliti membahas dampak dari Gerakan #MeToo khusus di Korea Selatan. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian adalah sama-sama meneliti gerakan #MeToo di Korea Selatan.

Penelitian kedelapan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asya Pambouc berjudul **The Globalization of the Me Too Movement : The Case Study of South Korea** pada tahun 2018³¹. Penelitian ini memaparkan terkait perkembangan Gerakan #MeToo di Korea Selatan yang telah berkembang pesat hanya dalam beberapa bulan sejak kemunculannya di negara tersebut. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Jepang dan China. Penelitian ini menyoroti keberanian perempuan di Korea Selatan yang dengan lantang menyuarakan protesnya. Keinginan mereka untuk mengubah ketidakadilan yang selama ini diterima oleh perempuan di Korea Selatan. Penelitian Asya Pambouc berbeda dengan penelitian peneliti saat ini. Penelitian Asya Pambouc berbicara mengenai bagaimana Gerakan #MeToo tersebut dapat berkembang di Korea Selatan di tengah sistem patriarki yang masih mengakar, sedangkan penelitian peneliti lebih

³¹ Asya Pambouc, "The Globalization of the Me Too Movement: The Case Study of South Korea," *The Globalization of the Me Too Movement*, no. May (2019): 1–23, https://www.researchgate.net/publication/332936632_The_Globalization_of_the_Me_To_o_Movement_The_Case_Study_of_South_Korea/citations.

menekankan pada dampak yang dihasilkan dari Gerakan #MeToo tersebut. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti perkembangan gerakan #MeToo di Korea Selatan.

Penelitian kesembilan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jinsook Kim berjudul **The Resurgence and Popularization of Feminism in South Korea : Key Issues and Challenges for Contemporaray Feminist Activisim** pada tahun 2021³². Penelitian ini memaparkan bagaimana perkembangan aktivitas feminisme di Korea Selatan. Dimana sejak 2015, aktivisme feminisme di Korea Selatan telah mendapatkan momentum dalam hal cakupan, jangkauan, dan agendanya. Sehingga memang benar jika feminisme di Korea Selatan sendiri telah mengalami kebangkitan, salah satunya karena meluasnya penggunaan teknologi dan platform media digital. Akibatnya, feminisme di Korea Selatan telah dipopulerkan dan diperluas jangkauannya untuk mempengaruhi diskusi publik tentang isu gender. Perbedaan penelitian Jinsook Kim dengan penelitian peneliti ini yaitu terkait fokus penelitian masing-masing peneliti. Jika penelitian Jinsook Kim membahas mengenai sejarah dan perkembangan aktivitas feminisme di Korea Selatan secara umum, penelitian peneliti lebih fokus pada perkembangan Gerakan feminisme #MeToo di Korea Selatan dan bagaimana Gerakan ini mempengaruhi kebijakan negara. Sedangkan

³² Kim, "The Resurgence and Popularization of Feminism in South Korea: Key Issues and Challenges for Contemporary Feminist Activism."

adalah meluasnya gerakan #MeToo ini menciptakan adanya kesempatan bagi masyarakat Korea Selatan untuk dapat menekan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang semakin tinggi jumlah kasusnya di Korea Selatan. Adanya gerakan #MeToo ini kemudian membawa diskusi tentang kekerasan dan pelecehan seksual di wacana publik semakin meluas hingga dapat membuat perubahan tersendiri dalam sistem sosial masyarakat Korea Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki sub bab. Berikut adalah uraian tentang sistematikanya :

Bab I merupakan bagian yang membahas pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan mengenai bagian pendahuluan, dimana peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi umum dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Landasan konseptual ini berisi kerangka konseptual dan landasan konsep yang akan diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka konseptual penelitian ini berupa gerakan #MeToo dan Isu pelecehan seksual sedangkan landasan konseptualnya menggunakan *Transnational Social Movement*, Media Sosial, dan Feminisme.

Bab III memaparkan metode penelitian yang peneliti gunakan untuk memperoleh data. Diuraikan juga pada bab ini mengenai Pendekatan dan

Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, Subyek dan Tingkat Analisa, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Bab IV menjelaskan mengenai pembahasan hasil yang didapatkan peneliti. Setelah data dan informasi dari studi dokumen berhasil peneliti kumpulkan, peneliti kemudian menganalisis data tersebut, sehingga dapat menjawab fokus penelitian. Dalam bab ini, peneliti membahas hasil penelitian dengan menguraikan menjadi sub bab tentang Sejarah Gerakan #MeToo, Fenomena Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan, Perkembangan Gerakan #MeToo di Korea Selatan, dan Dampak Gerakan #MeToo di Korea Selatan.

Bab V merupakan bab terakhir dari skripsi ini, peneliti menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan guna menjawab fokus penelitian dan memaparkan saran untuk disampaikan kepada pembaca dan peneliti di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Definisi Konseptual

1. Gerakan #MeToo

Gerakan #MeToo adalah gerakan yang memiliki tujuan untuk menunjukkan solidaritas dan memberi dukungan bagi para penyintas kekerasan dan pelecehan seksual. Pada tahun 2017, hastag #MeToo menjadi viral ketika seorang aktris Hollywood bernama Alyssa Milano menggunakan tagar #MeToo di twitternya. Alyssa membagikan pengalamannya tentang pelecehan seksual yang dialaminya.

Tagar ini pun diposting ulang hampir sebanyak satu juta kali dalam dua hari. Akhirnya tagar #MeToo ini pun menyebar ke seluruh dunia dalam menciptakan kesadaran, mencari dukungan, dan membangun komunitas penyintas kekerasan dan pelecehan seksual.¹ Gerakan #MeToo menjadi suatu gerakan sosial karena tidak hanya berlanjut di dunia digital saja namun, banyak aksi protes jalan untuk menyuarakan hak perempuan terkait lingkungan yang aman tanpa adanya kekerasan dan pelecehan seksual yang terus menghantui.

Gerakan #MeToo telah mendorong perubahan besar di dunia dengan menegaskan bagi para penyintas bahwa mereka tidak sendirian, mengembangkan komunitas yang lebih kuat untuk bersuara, dan

¹ Jennifer Klot, Pam Delargy, and T Turmen, "What Is Sexual Violence? Fact Sheet What Is Sexual Violence?," *Violence Against Women* 82 (2003): 411–418.

memberi kesadaran lebih bagi masyarakat dunia untuk mengingatkan betapa pentingnya masalah ini. Pada intinya, gerakan #MeToo adalah tanda solidaritas bagi para korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk dapat memiliki suara dalam mencari keadilan yang seharusnya mereka dapat sejak dulu.

2. Kebijakan Korea Selatan tentang Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Korea selatan telah menjelma sebagai salah satu negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir. Namun, menjadi salah satu negara maju dengan ekonomi terkuat di dunia, tidak juga membuat Korea Selatan terhindar dari masalah sosial di negaranya. Salah satunya yaitu kasus pelecehan dan kekerasan seksual.

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual masih menjadi rintangan panjang bagi Korea Selatan. Dengan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dapat mencapai ratusan kasus per hari nya, membuat pemerintah Korea Selatan berusaha untuk melindungi warganya dengan berbagai kebijakan yang mereka buat.

Pusat informasi hukum nasional Korea Selatan sendiri memiliki definisi terkait beberapa perilaku kejahatan seksual. Pertama yaitu pemerkosaan yang didefinisikan sebagai perzinahan paksa dengan kekerasan atau ancaman. Lalu, tindakan tidak senonoh yang didefinisikan pada tindakan perilaku seksual yang memiliki sifat sangat

merugikan yang dilakukan dengan motif untuk mendapatkan kegembiraan atau kepuasan hasrat seksual. Terlepas dari jenis kelamin atau usia, tindakan ini mensyaratkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat seksual untuk merangsang, membangkitkan, atau memuaskan hasrat seksual pelaku. Selanjutnya yaitu pelecehan seksual yang dimana jika terdapat seorang karyawan, pemberi kerja, pekerja lembaga publik atau hubungan lainnya yang menggunakan posisinya dalam kaitannya dengan pekerjaan untuk memberikan penghinaan seksual atau rasa jijik karena ucapan atau perilaku seksual. Ini mengacu pada tindakan yang memberikan kerugian pada pekerjaan.²

Dalam KUHP Korea Selatan sendiri, hukuman terkait kejahatan seksual telah terperinci dan mencakup berbagai tipe kejahatan seksual yang telah dilakukan. Seperti dalam KUHP Bab 32 tentang tindak pidana pemerkosaan dan perbuatan tidak senonoh dalam undang-undang Korea Selatan, pada pasal 297 tentang penyerangan atau ancaman terhadap seseorang dapat diancam dengan hukuman penjara 3 tahun atau lebih.³ Pasal 297 ini adalah pasal dasar dari banyaknya cabang pasal terkait berbagai macam tipe kejahatan seksual.

Namun kebijakan Korea Selatan terkait kasus pelecehan seksual dan pelanggaran seksual atas tipe kekuasaan seperti di bidang

² EasyLaw.go, "Easy-to-Find Lifestyle Laws - Victims of Sex Crimes," accessed April 29, 2023, <http://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=687&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1#687.1.1.1.3542611> .

³ Nasional Kementerian Perundang-undangan Pemerintah Korea Selatan, "Hukum Kriminal."

pelayanan publik, akademisi, dan dunia hiburan belum dapat memberikan hukuman yang setimpal pada para pelakunya. Seperti yang tertera dalam KUHP Bab 1 pasal 10 tentang perbuatan tidak senonoh dengan kekerasan dalam pekerjaan. tindakan ini dapat diberi hukuman penjara tidak lebih dari 3 tahun dan denda tidak lebih dari 15 juta won.⁴ Lalu pada pasal 13 tentang perilaku tidak senonoh di ruang publik, hanya akan dihukum penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari 3 juta won.⁵ Kemudian terdapat pasal 303 terkait perzinahan karena keunggulan kekuasaan dapat dikenai hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda tidak lebih dari 30 juta won.⁶

Berangkat dari kekhawatiran akan maraknya tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di ruang publik, ranah pekerjaan dan pendidikan, maka gerakan #MeToo utamanya menuntut agar pelaku dalam tipe kejahatan seksual tipe kekuasaan ini diberi hukuman yang lebih berat. Sehingga dengan adanya tambahan hukuman tersebut, diharapkan dapat mengurangi kejahatan seksual di ranah pekerjaan, pendidikan, dan ruang publik.

3. Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Menurut *World Health Organization* (WHO) yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual atau upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, suatu komentar seksual yang

⁴ “Pusat Penerangan Hukum Nasional Korea Selatan.”

⁵ Ibid.

⁶ “Daeryun Law Firm.”

tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau dengan cara lain ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban. Pemaksaan ini dapat mencakup berbagai tingkat kekuatan, intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman. Kekerasan seksual ini juga dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat memberikan persetujuan misalnya seperti saat sedang mabuk, dibius, tidur atau tidak mampu secara mental.⁷

Sedangkan menurut *Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC) definisi pelecehan seksual adalah rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk bantuan seksual, dan verbal atau fisik lainnya. Pelecehan seksual ini dapat berupa suatu komentar seksual ataupun candaan seksual yang membuat orang yang menerimanya merasa tidak nyaman. Pelecehan seksual juga dapat terjadi secara offline ataupun online. Pelecehan seksual online mencakup berbagai gambar atau video telanjang dan setengah telanjang tanpa persetujuan, intimidasi online seksual, komentar atau pesan seksual yang tidak diinginkan (termasuk di media sosial), eksploitasi seksual, pemaksaan, dan ancaman.⁸

⁷ World Health Organization and Pan American Health Organization, "Understanding and Addressing," *Violence against Women: Sexual Violence* (2013): 1.

⁸ EEOC, "What Is Sexual Harassment; EEOC ;Terminologies. What Is Sexual Harassment; EEOC ;Terminologies," *U.S. Equal Employment Opportunity Commission* 3, no. 1 (2019): 1–4, <https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatish.pdf>.

B. Landasan Konseptual

1. Peran Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah kekuatan kunci dari perubahan sosial di dunia modern. Karakteristik gerakan sosial adalah bahwa gerakan ini dapat memobilisasi dan mencapai tujuan mereka sebagian besar di luar saluran politik dan institusional yang ahli. Gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai kelompok terorganisir berjuang untuk bekerja menuju tujuan bersama. Gerakan sosial kemudian memiliki beragam tujuan bersama seperti mencoba untuk membuat perubahan (*Occupy Wall Street, Arab Spring*), untuk menolak perubahan (gerakan anti-globalisasi), atau untuk memberikan suara politik kepada mereka yang dicabut haknya (gerakan hak-hak sipil).⁹

Dari definisi tujuan gerakan sosial tersebut, gerakan #MeToo dapat digolongkan menjadi gerakan sosial yang bertujuan untuk membuat perubahan dan untuk memberikan suara politik kepada mereka yang dicabut haknya. Gerakan #MeToo memiliki tujuan utama dalam membuat perubahan dalam kebijakan pemerintah Korea selatan terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Mereka menuntut agar pemerintah merevisi undang-undang untuk memberikan efek jera pada pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Gerakan #MeToo juga berusaha membuat perubahan dalam sosial budaya di masyarakat Korea

⁹ William Little, *Introduction to Sociology - 2nd Canadian Edition*, BC Campus, <https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/>, 2016, <http://doer.col.org/handle/123456789/5674>. Hal 882.

Selatan yang masih memiliki budaya menyalahkan korban. Selain itu, gerakan #MeToo pada akhirnya berhasil menjangkau pemerintah pusat dengan terus menuntut keadilan bagi para korban kekerasan dan pelecehan seksual.

2. Transnational Social Movement

Transnational Social Movement atau gerakan sosial transnasional merupakan sebuah kolektivitas kelompok yang mendedikasikan diri untuk memobilisasi orang dengan cara yang berkelanjutan untuk mendukung tujuan perubahan sosial dan politik. Gerakan sosial transnasional ini memiliki posisi dan pengaruh yang lebih besar dalam sistem tata kelola nasional dan global, karena pencapaian utamanya adalah penciptaan, penguatan, implementasi, dan pemantauan norma-norma internasional. Adapun tujuan bersama yang ingin dipromosikan dari gerakan sosial transnasional ini antara lain demokrasi, lingkungan, feminisme, hak asasi manusia, standar perburuhan, perdamaian, dan tujuan agama.¹⁰

Transnational Social Movement didorong atas berkembangnya teknologi yang telah membantu munculnya konsep tersebut. Adanya akses telepon dan internet yang lebih luas, lalu mudahnya mobilisasi masyarakat dunia, serta media massa global yang telah memungkinkan orang-orang dari lapisan kelas yang lebih beragam dan asal untuk berbagai informasi dan memupuk hubungan kerja sama melintasi jarak

¹⁰ Jörg Balsiger, "Transnational Social Movement". Encyclopedia Britannica."

masing pemerintah agar mematuhi norma-norma internasional atau untuk meratifikasi perjanjian. Gerakan seperti ini mengumpulkan seruan terhadap norma atau aliansi internasional yang dapat menimbulkan tekanan internasional terhadap negara, sehingga mengubah keseimbangan kekuatan dalam politik nasional di negara tersebut.¹⁴

Menurut Kriesberg dalam tulisan yang dipaparkan Melissa terdapat lima cara yang dilakukan oleh *Transnational Social Movement* sehingga mampu mengubah lanskap politik yang ada. Pertama, memobilisasi dukungan untuk kebijakan tertentu. Kedua, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, mempertahankan perhatian publik pada isu-isu kritis. Keempat, mewakili atau membingkai masalah dengan cara tertentu. Kelima, memberlakukan kebijakan tertentu, atau membuat kebijakan tersebut terjadi.¹⁵

Dalam penelitian ini, konsep menurut Kriesberg digunakan dalam menjelaskan lebih lanjut bagaimana gerakan #MeToo dapat memberikan dampak bagi kebijakan dan sistem di masyarakat Korea Selatan. Sehingga konsep ini lebih mampu menjelaskan faktor keberhasilan gerakan #MeToo di Korea Selatan yang dapat menyebar

¹⁴ Ibid, 2.

¹⁵ Melissa Y. Rock, "Transnational Social Movement," *GEOG 128: Geography of International Affairs*.

secara massif di dunia dan utamanya di Korea Selatan dengan sistem patriarki yang masih mengakar kuat.

3. Media Sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, kita dapat melihat perubahan signifikan dari aktivitas internasional. Dunia modern telah menunjukkan adanya teknologi media baru yang telah meningkatkan adanya keterlibatan masyarakat luas terhadap isu-isu internasional. Adanya teknologi media baru ini kemudian tidak hanya sekedar menjangkau setiap individu untuk ikut terlibat namun, juga turut ikut memfasilitasi aktivisme yang lebih besar.

Di era globalisasi ini, penggunaan media digital diberikan peran penting dalam penyebaran gerakan yang cepat dan mobilisasi peserta. Hal tersebut tercermin dalam kenyataan bahwa semakin banyak orang menjadi aktif secara politik atau sipil melalui penggunaan berbagai jejaring sosial, dan jejaring sosial menjadi katalis penting bagi gerakan sosial.¹⁶

Media sosial telah mengambil alih penyebaran arus informasi di dunia. Saat ini, setiap orang yang memiliki gawai ataupun perangkat digital lain dapat dengan mudah mengakses setiap informasi yang ada dengan hanya sekali klik. Media sosial sendiri menurut Van Dijk dalam buku Nasrullah memaparkan jika media sosial merupakan platform

¹⁶ Manju K. Ahuja, Pankaj Patel, and Ayoung Suh, "The Influence of Social Media on Collective Action in the Context of Digital Activism: An Affordance Approach," *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences* 2018-Janua, no. January (2018): 2203–2212.

media yang fokus pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Sehingga karenanya, media sosial dapat juga dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.¹⁷

Adapun berbagai macam media sosial yaitu mulai dari media jejaring sosial seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *Line*, *Instagram*, situs berbagi konten seperti *Youtube* dan *Flickr*, penanda sosial seperti *Reddit.com*, media konten bersama atau *wiki*, jurnal online seperti *Wordpress* dan *Blogspot*, dan jurnal online sederhana (*micro-blogging*) seperti *Twitter*.¹⁸

Media sosial telah memanfaatkan kebebasan untuk berpendapat dalam mengumpulkan publik, mendapatkan umpan balik dari orang-orang yang menyutujuinya dan kemudian membangun solidaritas atas tujuan bersama yang mereka miliki.¹⁹ Hal tersebut juga yang diterapkan oleh media sosial seperti *Twitter*. Dimana *Twitter* sebagai agen jaringan yang mentransmisikan informasi pada tiap individunya. Ia menciptakan ruang protes dan membantu menyusun hubungan di antara aktor, masalah, dan peristiwa yang ada. Sehingga *Twitter* merupakan salah

¹⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositoteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 11.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Anastasia Kavada, "Creating the Collective: Social Media, the Occupy Movement and It's Constitution as a Collective Actor," *Information, Communication & Society* 18, no. 8 (2015): 872–886.

satu dari banyak mekanisme digital potensial yang menyusun dan mengkonfigurasi ruang protes.²⁰

Berbeda dari platform media sosial lainnya, Twitter adalah media sosial yang mampu menyediakan pembaruan secara *real-time* tentang apa yang terjadi di dunia, paling sederhana dan efisien. Twitter lebih baik daripada platform jejaring sosial lainnya dalam hal menyebarkan informasi di berbagai jaringan percakapan yang menghasilkan keterlibatan publik.²¹ Twitter sendiri digagas dengan bantuan tagar atau hastag karena big data yang dihasilkan oleh platform Twitter dapat membantu untuk memahami fakta dengan menganalisis kluster percakapan, memahami hubungan antar aktor terkait dan topik pembicaraan.²²

Twitter membawakan peran penting dalam memperkuat gerakan sosial digital dan memungkinkan banyak orang membangun komunitas online yang berkembang pesat. Hal tersebut sebagian besar karena penggunaan tagar atau hastag yang dimiliki Twitter. Gerakan sosial digital sering kali menggunakan tagar sebagai cara paling efektif untuk menciptakan gerakan tanpa batas, dari komunitas paling bawah hingga elit. Gerakan digital pada platform Twitter telah menyebar melintasi dimensi sosial, struktur, dan melapisi relasi kuasa yang ada

²⁰ Alexandra Segerberg and W. Lance Bennett, "Social Media and the Organization of Collective Action: Using Twitter to Explore the Ecologies of Two Climate Change Protests," *The Communication Review* 14, no. 3 (2011): 197.

²¹ Mohammad Thoriq Bahri, "Twitter Based Digital Social Movement Pattern to Fight COVID-19" (2021): 95–112.

²² Ibid.

bagi perempuan untuk bersatu dan membela hak-hak mereka dalam kerangka yang lebih luas. Hal tersebut yang kemudian membentuk gerakan perempuan di seluruh dunia yang mencari dukungan atas penindasan yang dialami oleh perempuan.²⁹ Gerakan sosial perempuan atas dasar semangat feminisme ini melakukan upaya besar-besaran untuk dapat menyadarkan masyarakat dan mendidik laki-laki dan perempuan tentang status sosial dan peran dasar mereka dalam masyarakat.

Dalam sejarah pergerakannya, terdapat empat gelombang feminisme yang masing-masing mempunyai fokus masalah yang berbeda. Gelombang pertama feminisme dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di negara-negara barat. Target utama gelombang ini adalah menciptakan peluang bagi perempuan sehingga fokusnya pada pencapaian hak pilih perempuan. Gelombang kedua feminisme terjadi pada tahun 1960-an hingga 1980-an, berusaha menghilangkan perbedaan budaya dan norma gender serta memperkuat peran perempuan yang setara dalam masyarakat sehingga fokusnya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri kelompok minoritas. Feminisme gelombang ketiga berlangsung dari tahun 1990-an hingga 2000-an dan mengacu pada spektrum aktivitas feminis yang luas. Gelombang feminis ini berusaha menunjukkan keragaman eksploitasi dan

²⁹ Anniamma Emmanue, "Feminist Movements In Global Perspective United Nations & The Rights Of The Women", Indian Political Science Associatio," *The Indian Journal of Political Science* 71, no. 3 (2010).

penindasan lintas karakteristik usia, ras, dan kelas. Terakhir, gelombang feminisme keempat dikembangkan sekitar tahun 2012 untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender di masyarakat menggunakan fasilitas internet. Perempuan di seluruh dunia berbagi pengalaman pelecehan seksual, kekerasan, pelecehan melalui media sosial online seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan lainnya.³⁰ Pada feminisme gelombang terakhir ini muncul beberapa populer hastag kampanye feminisme, salah satunya yaitu gerakan #MeToo.

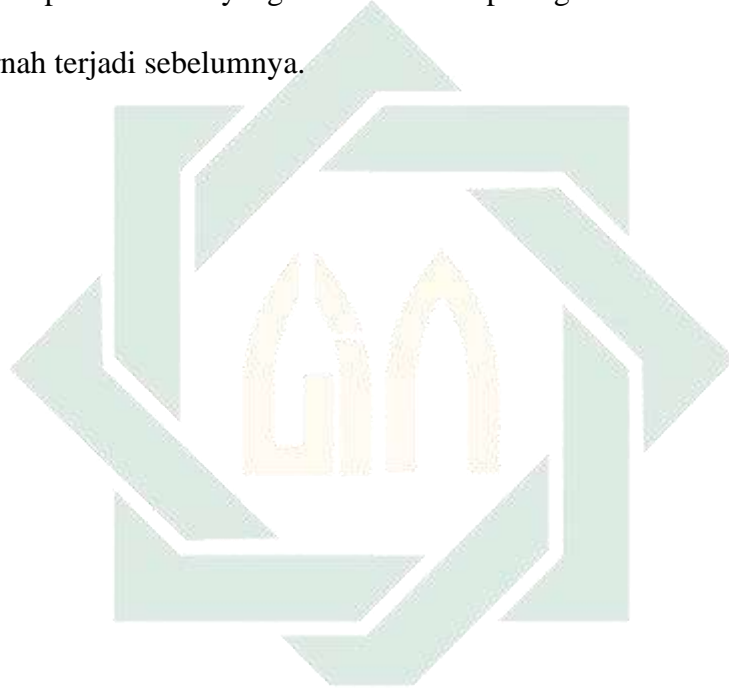
Gelombang feminisme keempat memanfaatkan internet dalam memobilisasi orang untuk mengambil tindakan melawan seksisme, misogini, atau kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.³¹ Hal tersebut relevan dengan gerakan #MeToo yang menggunakan hastag di platform Twitter dalam mewujudkan gerakannya agar mencapai skala yang lebih luas. Gerakan #MeToo membawa semangat feminisme gelombang keempat dalam memanfaatkan jejaring sosial untuk memperoleh dukungan dan perhatian dari masyarakat global atas isu-isu terkait perempuan.

Dari pemaparan tersebut, Feminisme ini menjadi salah satu konsep yang peneliti gunakan untuk menjelaskan bagaimana gerakan #MeToo dapat menjadi salah satu gerakan feminisme yang cukup

³⁰ Ibid.

³¹ "Council of Europe."

berhasil membawa perubahan terkait isu kekerasan dan pelecehan seksual di dunia internasional. Konsep feminisme juga akan lebih menyoroti bagaimana gerakan #MeToo di Korea Selatan dapat mendapat sambutan yang lebih besar daripada gerakan feminisme yang pernah terjadi sebelumnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dalam melakukan penelitian ini. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di lapangan misalnya perilaku dan suatu tindakan yang tergambarkan dalam bentuk kata-kata, tulisan dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹ Sehingga sederhananya metode ini digunakan untuk melakukan suatu pendekatan untuk lebih memahami ataupun mengeksplorasi fenomena yang sedang terjadi.

Dari pengertian tersebut kemudian, penelitian ini peneliti lakukan dengan cara mengamati fenomena gerakan #MeToo yang terjadi di Korea Selatan. Peneliti tidak melakukan studi lapangan dengan cara melihat langsung bagaimana demonstrasi yang dilakukan gerakan #MeToo Korea Selatan, tetapi peneliti melakukan penelusuran dan pencarian data melalui berbagai dokumen yang diperoleh melalui internet.

Pendekatan kualitatif-deskriptif membutuhkan proses sistematis dan mendalam. Untuk itu peneliti harus fokus dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan memilah-milahnya dengan baik sesuai dengan topik

¹ Lexy J Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 6.

penelitian. Data-data tersebut untuk dapat menjawab argumentasi utama dan membuktikan teori atau konsep yang telah dipilih. Penelitian dengan metode deskriptif ini juga yaitu penelitian yang tujuan utamanya untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau *how* dalam fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis penelitian secara induktif, yang melibatkan pemeriksaan data dari tema khusus ke tema umum.² Pendekatan induktif adalah pendekatan yang berangkat dari fakta yang di temukan di lapangan kemudian menganalisis fakta tersebut, mempertanyakan dan menghubungkannya dengan teori, klaim, hukum yang sesuai dan menarik kesimpulan.³

Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif adalah suatu metode yang menguraikan masalah yang timbul berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus yang kemudian dikaji lebih lanjut untuk dipecahkan permasalahannya dan dapat ditarik kesimpulan secara umum. Dengan demikian, peneliti dapat menggambarkan mengenai peran gerakan #MeToo dalam mengubah kebijakan tentang kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk melakukan penelitian ini dimulai dari bulan September 2022 hingga Juni 2023.

² J. Cresswell, *Research Disig: Qualitative & Quantitative Aooriaches* (CA: Sage Publication, 1998), 31.

³ Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (Bandung: grafika Indonesia, 2011).

C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa

Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah segala sesuatu baik itu orang, benda, proses, kegiatan atau tempat dimana variable penelitian melekat dan dipermasalahkan dalam penelitian.⁴ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat korea yang terlibat dalam gerakan #MeToo dan pemerintah Korea Selatan yang memiliki andil dalam keputusan diubahnya undang-undang terkait kekerasan dan pelecehan seksual.

D. Level Analisis

Hal lain yang penting dalam suatu penelitian adalah menentukan level analisis. Menurut Mochtar Mas'oeed, tingkat analisa di dalam Ilmu Hubungan Internasional adalah individu, kelompok-individu, negara-bangsa, kelompok negara-negara dalam suatu regional, dan sistem global.⁵ Dari pengertian tersebut, peneliti menggunakan tingkat analisa yang kedua, yaitu tingkat kelompok-individu. Peneliti memilih menggunakan tingkat analisa tersebut karena di konteks penelitian ini, ada individu yang mengungkap dan menyebar luaskan hastag #MeToo di Korea Selatan. Gerakan yang dilakukan oleh individu ini kemudian memicu gerakan kelompok yang meluas menjadi gerakan sosial. Kelompok masyarakat di Korea Selatan yang menyuarakan keprihatinannya terkait masalah kekerasan dan pelecehan seksual dalam gerakan #MeToo. Pada akhirnya

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 88.

⁵ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 35-40.

mereka berhasil menjangkau pemangku kebijakan untuk mengubah peraturan yang ada agar dapat memenuhi permintaan masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti yaitu menggunakan studi dokumen. Studi dokumen ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui buku, artikel ilmiah, pencarian web, dan berbagai video yang memiliki kredibilitas yang jelas.⁶

Peneliti kemudian mengumpulkan data dari berbagai referensi dari internet seperti artikel berita dan jurnal dari laman pemerintah Korea Selatan terkait gerakan #MeToo lalu beberapa skripsi dan buku yang memiliki pembahasan sesuai dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mendapatkan data terbaru dari aksi gerakan #MeToo di lapangan dari beberapa website asosiasi di Korea Selatan seperti Asosiasi Pekerja Wanita Korea dan Pusat Bantuan Kekerasan Seksual Korea yang mendukung dan terus melaporkan perkembangan Gerakan #MeToo di Korea Selatan. Sehingga dengan teknik tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat secara rinci dan terpercaya.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini, Peneliti melakukan beberapa tahapan analisis data. Tahapan-tahapan ini Peneliti adopsi dari

⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–181.

penjelasan Miles, dan Huberman. Tahapan-tahapan dalam teknis analisis data tersebut adalah:⁷

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Proses ini berguna untuk menyederhanakan data Langkah ini diperlukan untuk memfokuskan data yang dirasa penting dan mempermudah peneliti untuk melakukan tahap analisis selanjutnya yaitu penyajian data.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa dokumen di laman resmi pemerintah Korea Selatan seperti <https://law.go.kr/LSW/eng/engMain.do?eventGubun=060124> dan <http://www.mogef.go.kr/eng/index.do> untuk mendapatkan data dari sumber yang lebih terpercaya. Selain itu, Peneliti menggali lebih dalam terkait aksi gerakan #MeToo di lapangan melalui beberapa laman asosiasi resmi di Korea Selatan yang mendukung gerakan #MeToo seperti <https://www.sisters.or.kr/en/whoweare>, <http://women21.or.kr/kwau>, dan <https://kwwnet.org/>.

⁷ Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014), Hal 8.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan peneliti dalam bentuk uraian-uraian tentang gerakan #MeToo ini. Peneliti juga membuat tabel, bagan, dan mengambil gambar dari sumber-sumber yang Peneliti gunakan. Peneliti kemudian memberi penjelasan terhadap tabel, bagan atau gambar tersebut. Dengan adanya penyajian data ini, maka akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami isu dan fakta yang diangkat peneliti yaitu gerakan #MeToo yang terjadi di Korea Selatan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari teknik analisis data dari penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman, tahap ini telah dicapai jika semua data yang di dapat telah disederhanakan dan disajikan sesuai dengan apa yang ingin ditemukan dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses analisis data dengan meringkas poin-poin penting dalam penelitian yang dapat menjawab argumentasi utama yang telah dibangun di awal penelitian. Pada penelitian ini kesimpulan tersebut tentu harus sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana peran gerakan #MeToo dalam perubahan kebijakan pelecehan dan kekerasan seksual Korea Selatan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti juga melakukan proses uji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan sebagai tahap terakhir penelitian. Menurut Moloeng dalam

mencapai keabsahan data yang diinginkan, ada beberapa teknik pemeriksaan yang perlu dilakukan, yaitu Perpanjangan keikutsertaan, Ketekunan Pengamatan, Triangulasi dan Kecukupan Referensi.⁸

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan Triangulasi Sumber.

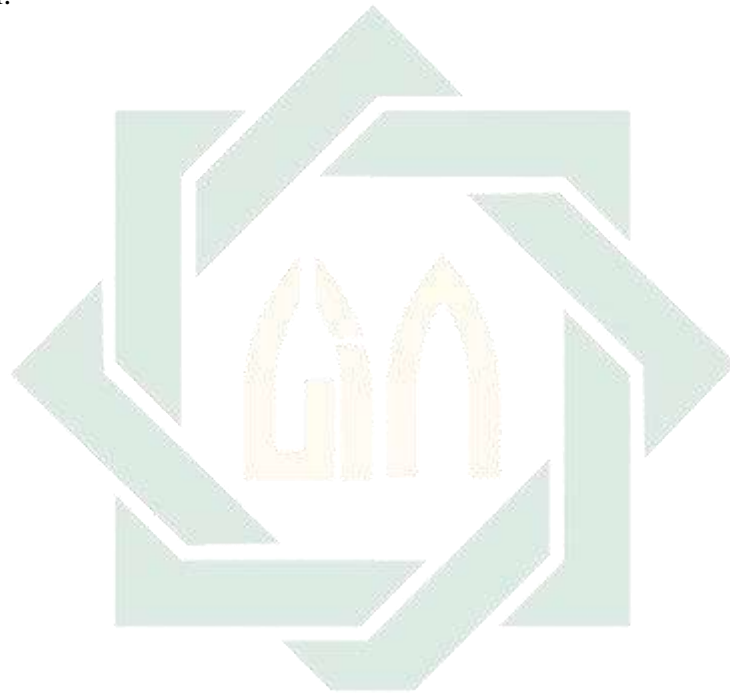
1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah teknik pemeriksaan dengan cara memeriksa ulang data. Pengecekan ulang ini dilakukan agar meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan data dan mengurangi adanya bias penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan dan melakukan pemeriksaan kembali pada data atau informasi yang telah didapatkan melalui sumber yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dipertanggung jawabkan dan memberikan kepercayaan lebih dalam terhadap temuan penelitian.

Untuk memperoleh hal tersebut, Peneliti melakukan beberapa cara seperti membandingkan hasil data yang diperoleh dari laman berita atau jurnal dengan laman resmi pemerintah Korea Selatan sendiri, lalu membandingkan antara data yang didapatkan dari jurnal dengan realita di lapangan melalui akun resmi asosiasi yang mendukung gerakan #Metoo. Contohnya yaitu jika menemukan data yang relevan dengan topik penelitian di blog non-formal di internet seperti *wordpress* atau sumber tidak resmi lain, dilakukan pemeriksaan kembali dengan membandingkannya dengan

⁸ Ibid.

website resmi pemerintah Korea Selatan seperti *Gov.Kr*. Sehingga dengan pengecekan ulang kembali ini, data yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya dan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Peneliti.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gerakan #MeToo di dunia Internasional

Gerakan #MeToo merupakan wadah bagi orang-orang yang turut prihatin terkait masalah kekerasan seksual dan mendorong terjadinya tindakan bersama. Gerakan ini hadir di dunia untuk memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh sebuah universalitas dalam melawan suatu isu berbasis norma. Dalam sistem sosial yang masih membungkam para korban kekerasan dan pelecehan seksual, Gerakan #MeToo datang untuk membebaskan suara-suara yang meminta keadilan tersebut.

Gerakan #MeToo telah menjadi sebuah topik hangat dalam dunia internasional di tahun 2017. Gerakan tersebut memperlihatkan bahwa protes dapat menjadi sebuah gerakan ketika satu teriakan kemarahan menjadi upaya bersama menuju perubahan yang bertahan lama dan mewujudkan keinginan adanya transformasi global. Tagar #MeToo yang digunakan ini telah menggemakan suara yang lebih besar dari teriakan individu. Hal tersebut membuat teriakan yang awalnya berpusat pada tiap individu, kini menjadi teriakan bersama—teriakan ‘kami’ yang telah berbagi pengalaman dan menggaungkan solidaritas dari berbagai macam orang dan jenis kelamin lintas sosial, etnis, politik untuk memahami bahwa mereka tidak sendirian.¹

¹ Giti Chandra and Irma Erlingsdóttir, *The Routledge Handbook of the Politics of The# Metoo Movement*, berilustra. (Routledge, 2020), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fREIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=me+too+movement+history&ots=X78UfYjegv&sig=5HZaK1qPt5WOkbXv8TDOKCxhrnw&redir_esc=y#v=onepage&q=me too movement history&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fREIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=me+too+movement+history&ots=X78UfYjegv&sig=5HZaK1qPt5WOkbXv8TDOKCxhrnw&redir_esc=y#v=onepage&q=me%20too%20movement%20history&f=false).

Sejarah awal Gerakan #MeToo pertama kali diinisiasi oleh seorang perempuan kulit hitam bernama Tarana Burke pada tahun 2006 untuk mempromosikan solidaritas dan dukungan kepada perempuan berkulit hitam yang terpinggirkan. Pada saat itu, perkembangan gerakan #MeToo ini masih terbatas karena masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya isu kekerasan dan pelecehan seksual.

Barulah pada beberapa tahun berikutnya, gerakan #MeToo ini telah menarik banyak kesadaran dan menyebar luas di masyarakat awam. Dengan adanya banyak protes dan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, Gerakan #MeToo pun menjadi panggilan keras bagi sistem sosial untuk membawa isu kekerasan seksual ke permukaan.²

Adanya keterbatasan jaringan membuat Gerakan #MeToo pada tahun 2006 berkembang hanya di Amerika saja. Barulah pada tahun 2017, Gerakan #MeToo ini mendapatkan momentumnya. Dimana terdapat seorang artis Hollywood bernama Alyssa Milano yang memanfaatkan twitter pribadinya untuk memperoleh dukungan atas pengalaman pahitnya mendapatkan tindakan kekerasan seksual dari rekan kerjanya. Alyssa menggunakan kata 'Me Too' di postingannya untuk memberitahu jika dia adalah korban dan mengajak semua orang untuk bersama-sama menyuarakan pengalaman pahit yang pernah mereka terima.³

² Ibid.

³ Ibid.

Postingan yang dibuat oleh Alyssa di twitternya itu pun hanya butuh waktu 24 Jam untuk membuat hampir setengah juta perempuan di dunia mengikuti langkahnya dengan menceritakan pengalamannya pahitnya dan menambahkan hastag #MeToo di setiap postingan mereka. Kekuatan jaringan internet pada tahun 2017 yang luar biasa cepatnya telah membuat hastag #MeToo mengambil alih media sosial. Twitter sendiri bahkan telah mengkonfirmasi melalui CBS News bahwa lebih dari 1,7 juta postingan yang menyertakan tagar #MeToo di 85 negara yang setiap negara memiliki setidaknya 1.000 postingan dengan tagar #MeToo.⁴

Tagar #MeToo ini tidak hanya menjadi topik hangat di Twitter namun juga berbagai media sosial lainnya seperti Facebook. Data statistik yang dibagikan oleh *Facebook* menunjukkan ada lebih dari 12 juta postingan, komentar, dan reaksi terkait topik 'Me Too' dalam waktu kurang dari 24 jam oleh 4,7 juta pengguna *facebook* di seluruh dunia.⁵

Ledakan besar tagar #MeToo ini membuka diskusi yang lebih luas tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di setiap lingkup sosial yang ada mulai dari lingkup sekolah, instansi, ataupun lingkup pekerjaan seperti industri hiburan. Hal tersebut juga mendorong banyak cerita muncul tentang orang-orang terkenal yang memiliki kekuatan dan posisi yang diduga meyerang dan melecehkan wanita.

⁴ CBS NEWS, “#MeToo Reaches 85 Countries with 1,7M Tweets.”

⁵ Ibid.

seterbuka Amerika Utara dan Eropa, gerakan #MeToo ini telah memiliki pengaruh yang signifikan di China, Korea Selatan, dan Jepang.⁸ Yang mana terlepas dari kekayaan yang tersebar luas dan PDB yang tinggi, ketiga negara utama tersebut adalah negara-negara di mana ketidaksetaraan gender cukup tinggi. Patriarki tersebar luas, relatif sedikit peluang bagi perempuan untuk memegang peran kepemimpinan, dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada saluran bagi perempuan untuk melaporkan pelecehan seksual.

Gerakan #MeToo telah menciptakan momen dimana pembuat kebijakan perusahaan, universitas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Lembaga Swadaya Masyarakat, ilmuwan, atlet, industri hiburan, profesional hukum, dan banyak lainnya tidak memiliki pilihan selain mengatasi pelecehan seksual. Sehingga dari hal tersebut, banyak yang melawan dan mengatasi isu kekerasan dan pelecehan seksual tersebut dengan semangat pembaruan. Ekspektasi juga berubah dimana yang sebelumnya pelecehan seksual dianggap hal yang tidak dapat dihindari dan tidak dihindarkan, kini ekspektasi seperti itu pun berubah. Masyarakat dunia semakin menyadari bahwa isu kekerasan dan pelecehan seksual ini bukanlah sesuatu yang dapat di'wajar'kan. Sehingga dengan semangat seperti itu lah yang membuat masyarakat global melihat kesempatan untuk membawa perubahan besar dalam isu sosial terkait gender di dunia.

⁸ Time.com, "How #MeToo Is Taking on a Life of Its Own in Asia."

B. Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan

Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan isu sosial yang sudah lama menjadi permasalahan masyarakat di dunia. Di Korea Selatan sendiri, isu kekerasan dan pelecehan seksual telah dari lama menghantui kehidupan sehari-hari warganya terutama kaum perempuan, Sebagian besar kasus kekerasan dan pelecehan seksual menyangkut perempuan dan anak-anak untuk menjadikannya korban. Faktanya, empat dari 10 perempuan di Korea Selatan pernah mengalami kekerasan seksual setidaknya sekali seumur hidup. Per tahun 2019, presentase perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam hidup mereka adalah sebesar 38,6%. Khususnya dalam satu tahun terakhir, sebanyak 39.509 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke polisi melalui laporan. Sejak tahun 2014, kejahatan yang menyumbang presentase kejahatan kekerasan seksual tertinggi setiap tahun adalah pemerkosaan dan penyerangan tidak senonoh.⁹

Tidak hanya kejahatan seksual secara langsung saja yang semakin meresahkan, namun kejahatan seksual secara digital juga makin meningkat. Kejahatan seksual digital ini seperti produksi dan distribusi eksploitasi seksual anak dan remaja, dan pembuatan film ilegal yang kebanyakan aksinya menggunakan kamera tersembunyi atau *hidden camera*. Rasio kejahatan seksual digital ini meningkat dari angka 20,2%

⁹ Oh Se Jin, "38.6% of Women in Korea Have Experienced Sexual Violence..Serious Increase in Digital Sex Crimes."

menjadi boomerang kepada para pekerja perempuan yang ikut. Seringnya saat makan mala mini para pekerja perempuan tersebut mendapat pelecehan seksual seperti ucapan atau candaan berbau seksual, kontak fisik yang tidak menyenangkan seperti merangkul tanpa izin, dan pemaksaan minum.¹³

Pelaku kekerasan dan pelecehan seksual ini mayoritas adalah laki-laki sebanyak 83,6% dan perempuan sebesar 16,4%. Dari survei yang sama dipaparkan jika sebanyak 61,1% pelaku kekerasan dan pelecehan seksual tersebut adalah atasan atau bos korban. Sehingga Sebagian besar pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja paling banyak dialami oleh pekerja tidak tetap berusia 20-an dan 30-an.¹⁴ Ini menunjukkan kerentanan para karyawan perempuan muda menjadi korban pelecehan di tempat dimana ia harusnya dapat bekerja dan berinovasi dengan nyaman.

Kejahatan seksual merupakan masalah yang tidak mudah diselesaikan. Realitanya ketika suatu isu sosial telah mengakar kuat dalam sistem masyarakatnya, hal ini juga dapat ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat yang lain. Dalam isu kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan, isu tersebut tidak hanya menjangkiti dunia profesional atau instansi formal dalam negeri tersebut.

¹³ Federation of Korea Trade Unions, "Types of Sexual Harassment in the Workplace, 'boss Making Sexual Jokes during Dinner' the Most."

¹⁴ Ibid.

Sayangnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini juga terjadi dalam lingkup pendidikan dan dunia hiburan mereka.

Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman bagi pelajar untuk dapat menimba ilmu dan mengejar mimpi-mimpinya. Sayangnya karena kurangnya rasa tanggung jawab oleh beberapa orang membuat sekolah bagi para pelajar menjadi tempat yang berbahaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan sendiri mengumumkan hasil survei yang dilakukan oleh Institut Pengembangan Perempuan di Korea Selatan pada tahun 2017 bahwa dari 1014 sekolah menengah atas yang mereka survei, sebanyak 40,9% responden mengatakan bahwa pelecehan seksual terjadi setelah masuk sekolah. Survei ini diikuti oleh 814 siswa perempuan dan 200 siswa sekolah menengah atas secara nasional.¹⁵

Dari survei yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan tersebut, mayoritas pelaku pelecehan seksual ini adalah guru sekolah dari para siswa itu sendiri. Sebanyak 34,4% responden mengatakan bahwa guru melakukan pelecehan seksual secara fisik kepada siswa seperti menyentuh atau memeluk kepala, tangan, bahu dan paha siswa, serta mengusap pipi mereka. 21,2% responden lainnya mengatakan bahwa mereka pernah dilecehkan secara seksual dengan berbicara kotor di kelas dan membuat candaan seksual atau menanyakan sejauh mana kemajuan mereka dengan teman lawan jenis. 27,7% siswa lainnya

¹⁵ Kukmin Daily, "40% Siswa Sekolah Menengah 'Ada Pelecehan Seksual Di Sekolah Oleh Guru' Investigasi Komisi Hak Asasi Manusia."

mengatakan bahwa mereka bahkan pernah dilecehkan secara langsung oleh guru yaitu seperti menunjuk pakaian dan menyodok bagian tubuh dengan tongkat pemandu atau memperlihatkan seragam sekolah untuk memeriksa panjang rok siswa.¹⁶

Isu pelecehan dan kekerasan seksual di ranah pendidikan tidak berhenti sampai disitu saja. Faktanya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di ranah sekolah tinggi atau universitas berada di kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 321 kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di universitas dan pada tahun 2019 bertambah jumlah kasusnya sebanyak 348 kasus.¹⁷ Mayoritas pelaku pelecehan dan kekerasan seksual ini adalah seorang professor dimana mereka membuat lelucon yang tidak pantas kepada seorang siswa atau melakukan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Kejahatan seks digital, termasuk pembuatan film illegal.¹⁸

Fenomena kekerasan dan pelecehan seksual ini juga marak terjadi di lingkup dunia hiburan Korea Selatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center untuk Kesetaraan Gender dalam industri film korea pada tahun 2018, hampir 3 dari 4 perempuan di industri film mengatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Dalam survei yang dilakukan terhadap 834 orang di industri film Korea Selatan, sebanyak 58,3% responden mengatakan pernah

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Federal Ministry of Justice and the Federal Office of Justice, "The Act to Promote Transparency in Wage Structures among Women and Men."f

¹⁸ Ibid.

mengalami beberapa jenis kekerasan atau pelecehan seksual. Jenis pelecehan seksual atau kekerasan yang dialami oleh korban paling umum adalah komentar seksual tentang penampilan mereka dan diikuti dengan lelucon cabul.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, kita mengetahui jika isu kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan nyatanya tidak hanya terjadi secara random yang dilakukan oleh pelaku asing dan tidak dikenal. Sayangnya kebanyakan kasus malah terjadi dalam lingkungan yang kita merasa familiar dan dengan pelaku yang kita kenal. Sehingga dari hal tersebut dapat membuktikan jika isu kekerasan pelecehan dan kekerasan seksual ini tidak terbatas oleh tempat, orang, ataupun waktu. Semua orang dapat menjadi korban dan semua orang juga dapat menjadi pelaku.

C. Perkembangan Gerakan #MeToo di Korea Selatan

Feminisme di Korea Selatan masih belum mendapatkan tempat di tengah masyarakatnya. Dalam budaya patriarki yang masih mengakar kuat sejak lama, perjuangan dalam menuntaskan isu-isu feminisme tentu bukan hal yang mudah. Nilai-nilai feminisme yang bertolak belakang dengan budaya tersebut membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat yang sudah sejak lama menerapkan budaya tersebut.

¹⁹ Song Seung Hyun, "More than 70% of Women in Film Biz Experience Sexual Violence, Harassment."

Budaya patriarki ini juga berkaitan dengan ajaran Konfusianisme yang memiliki pengaruh dan bertahan lama dalam nilai-nilai Korea Selatan, termasuk dalam bidang keluarga dan pendidikan. Ajaran konfusianisme ini diadopsi sebagai agama nasional selama Dinasti Chosun yang telah mendominasi masyarakat Korea Selatan, khususnya perempuan.²⁰ Definisi konfusius tentang hubungan laki-laki dan perempuan adalah bahwa harus ada perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan dimana perempuan harus lemah dan lembut dan laki-laki harus kuat. Definisi konfusianisme tentang perbedaan tersebut juga ditafsirkan sebagai perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dimana menurut ajaran ini, perempuan di sepanjang hidup mereka seharusnya mematuhi tiga otoritas, ayah saat muda, suami saat menikah, dan anak laki-laki saat menjanda.²¹

Ajaran konfusius yang menekankan laki-laki berada di atas perempuan telah menghasilkan seksisme yang meluas dan masyarakat yang ditentukan oleh gender. Hal tersebut kemudian yang menciptakan sistem bernama patriarki dimana laki-laki unggul dalam hierarki, mendominasi, menindas atau bahkan mampu mengeksploitasi perempuan. Dominasi dalam hirarki inilah yang kemudian menciptakan peluang diskriminasi dan pengeksploitasian terhadap perempuan.

²⁰ Kyung-Ai Kim, "Nationalism: An Advocate of, or a Barrier to, Feminism in South Korea, *Women's Studies International Forum*" 19, no. 2 (1996): 1–2.

²¹ *Ibid*, 66

Selain ajaran konfusiusme ini, alasan lain atas penolakan kuat terhadap feminisme di Korea Selatan adalah kesalahpahaman masyarakat atas nilai yang diperjuangkan feminisme. Masyarakat yang menolak feminisme yang mana mayoritas adalah laki-laki meyakini bahwa demonisasi wacana dan ideologi feminis yang tersebut identik dengan radikalisme dan misandri. Para pendukung anti-feminisme juga percaya bahwa gerakan tersebut adalah gerakan supremasi perempuan yang bertujuan untuk menjatuhkan laki-laki.²² Sehingga masyarakat merasa terancam akan hal tersebut dan menentang keras gerakan feminisme.

Tetapi, meskipun konsep feminisme masih sulit diterima oleh sebagian masyarakat Korea Selatan, gerakan feminisme sendiri tidak dapat dibendung pergerakannya. Karena pada kenyatannya, konsep feminisme ada untuk membantu perempuan dan bahkan laki-laki sekalipun dalam memperoleh keadilan di sistem sosial yang ada. Dan fakta bahwa perempuan di Korea Selatan masih mengalami diskriminasi dan seksisme yang parah pun tidak dapat diubah. Kekhawatiran kaum perempuan di Korea Selatan ini lah yang kemudian mendorong gerakan feminisme seperti #MeToo dapat masuk di negara tersebut.

Gerakan #MeToo mulanya lebih dulu diciptakan oleh Tarana Burke pada tahun 2006 untuk membantu para korban kekerasan atau pelecehan seksual. Gerakan ini dapat membantu masyarakat awam memahami

²² The Diplomat, "How Feminism Became a Dirty Word in South Korea."

masalahnya dan menyadarkan masyarakat akan skala pelecehan seksual yang masih merajalela di masyarakat. Barulah pada tahun 2017, seorang aktris dan aktivis Amerika yaitu Alyssa Milano membuat postingan di Twitter untuk memberi wadah bagi para korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam membuka suara atas perilaku tidak enak yang mereka terima dengan menggunakan tagar #MeToo.²³ Gerakan #MeToo ini lantas menyebar luas di internet dan menjadi topik hangat di Twitter di banyak negara dunia.

Gerakan #MeToo mengungkapkan mengapa sebagian besar korban kekerasan memilih untuk diam daripada menuduh pelaku. Dari banyak kasus, korban tidak dapat menuduh pelaku karena mereka tidak dapat mengalahkan dominasi kekuasaan yang pelaku miliki.²⁴ Sehingga mereka tidak dapat melaporkan pelaku yang mungkin adalah atasan atau bos, rekan kerja, atau bahkan guru mereka.

Dari hal tersebut, gerakan #MeToo yang awalnya dimulai di Amerika Serikat dapat menyebar luas di Korea Selatan karena fokus gerakan yang sesuai oleh keadaan perempuan di negara tersebut. Dimana mereka hidup di tengah diskriminasi dan eksploitasi oleh sistem yang membuat mereka kalah atas dominasi dan unggulnya kekuasaan bagi laki-laki. Ini membuat rentannya kaum perempuan untuk

²³ Rituparna Bhattacharyya, “#MeToo Movement: An Awareness Campaign. International,” *Journal of Innovation, Creativity and Change* 3, no. 4 (2018): 4.

²⁴ Ibid, 6.

oleh Seo Ji Hyun lantas memantik inspirasi bagi banyak wanita untuk berbagi pengalaman mereka sendiri.²⁶

Gambar 4. 1: Pengakuan Jaksa Seo Ji-Hyun di kanal berita JTBC terkait pelecehan seksual yang pernah Ia terima.



Sumber : Chosun Media²⁷

Pengakuan berani Seo Ji Hyun ini juga lantas membuat dukungan mengalir untuknya dan gerakan #MeToo juga semakin menyebar ke seluruh masyarakat.²⁸ Bahkan setelah pengakuan Seo Ji Hyun di hadapan publik ini, jumlah penyebutan kata ‘Me Too’ mencapai 71.738 tweet pada minggu pertama Februari 2018.²⁹

Gerakan #MeToo ini pun memulai babak awal dalam melawan isu kekerasan dan pelecehan seksual ketika para korban berani membuka

²⁶ Hasunuma and Shin, “#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou.”

²⁷ Chosun Media. 2018. “Why did Prosecutor Seo Ji-Hyun shout ‘MeToo’ for the first time in 8 years?” https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2018/01/30/2018013001857.html Diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 22.09

²⁸ Ibid.

²⁹ Oh Soo Jin, “The Spreading ‘Me Too’ Movement...SNS Public Opinion ‘Active Support’ Prevails.”

suaranya.³⁰ Gerakan #MeToo menyediakan wadah agar para korban dapat mengatasi traumanya dengan mengungkapkan kepada dunia lukanya yang tidak dapat dia ungkapkan atau protes selama bertahun-tahun lamanya. Sehingga gerakan #MeToo ini pun tidak cukup hanya sebatas gerakan digital saja namun menjadi aksi turun ke jalan.

Unjuk rasa pendukung gerakan #MeToo ini mempunyai misi untuk mendukung para korban, meningkatkan kesadaran publik, mendorong reformasi untuk mencegah kasus pelecehan seksual, dan mencari keadilan. Mereka juga menuntut reformasi mendasar dari ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat dan budaya yang marak terjadi pemerkosaan.³¹

Aksi unjuk rasa gerakan #MeToo ini dilakukan sebanyak enam kali. Pada aksi publik pertama mereka digelar selama dua hari berturut-turut pada tanggal 22 dan 23 Maret 2018 di Taman Chong-gye di Pusat Kota Seoul. Banyak wanita naik ke atas panggung yang disediakan dan membagi cerita nya dengan wanita lain tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang ia alami, juga mendengarkan dan mendukung satu sama lain. Bagi wanita yang tidak dapat atau tidak mau berbicara di atas panggung, sebuah dinding disisihkan untuk catatan tertulis dan pesan tentang pengalaman mereka. Aksi demonstrasi kedua terjadi pada 7

³⁰ Hee-Eun Lee, "Feminist Activism and Media Ethics - Exploring the Relationship between #MeToo Movement and Media," *Journal of communication research* 55, no. 3 (2018): 120.

³¹ Hasunuma and Shin, "#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou."

April, aksi ketiga pada 21 April, yang keempat pada 17 Mei, Kelima pada 18 Agustus, dan yang keenam pada tanggal 1 Desember. Pada aksi protes kelima, gerakan #MeToo ini berhasil mengumpulkan sebanyak 20.000 warga yang berpartisipasi dan merupakan protes terbesar dari enam aksi demonstrasi pada tahun 2018.³²

Gerakan #MeToo pada akhirnya menjadi fenomena nasional di Korea Selatan. Gerakan ini menciptakan kesempatan perubahan bagi perempuan untuk melawan kekerasan dan pelecehan seksual dan meminta keadilan untuk kehidupan yang aman. Sehingga gerakan #MeToo ini lebih dari sekedar berbicara kekerasan antara pelaku dan korban. lebih dari itu, hal tersebut adalah refleksi dari budaya yang telah lama menoleransi persepsi yang menyimpang terkait perilaku seks, penggunaan kekuasaan yang tidak adil, dan akibat dari pelecehan dan kekerasan seksual. Maka gerakan #MeToo ini sekali lagi hadir untuk dapat membantu membangun budaya percaya dan berempati kepada para korban ketika mereka mengadukan serta membantu para korban untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka.³³

D. Gerakan #MeToo dan Perubahan Kebijakan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Korea Selatan

Gerakan #MeToo berusaha menunjukkan betapa mengerikannya relasi kuasa yang dimiliki laki-laki atas perempuan dalam sistem yang

³² Ibid.

³³ “Pusat Penerangan Hukum Nasional Korea Selatan.”

berada di tengah masyarakat. Dominasi kekuasaan adalah penyakit sosial yang kemudian melahirkan kasus seperti diskriminasi, penindasan dan kebanyakan kasus kejahatan seksual berangkat dari dominasi kekuasaan yang kuat di masyarakat. Gerakan #MeToo ini kemudian menuntut agar ketidakadilan struktural ini diantisipasi dengan pemberian hukuman yang lebih berat bagi para pelakunya.

Hukuman untuk kasus kejahatan dan pelecehan seksual ini sudah ada dalam Undang-Undang Korea Selatan yaitu dalam hukum kriminal pada Bab 32 tentang kejahatan pemerkosaan dan tindakan tidak senonoh. Pada pasal 297 disebutkan bahwa orang yang memerkosa orang lain dengan kekerasan atau ancaman, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.³⁴ Kemudian terdapat pasal 303 terkait perzinahan karena keunggulan kekuasaan dapat dikenai hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda tidak lebih dari 30 juta won.³⁵ Lalu pada Bab 2 kasus tentang hukuman dan tata cara tindak pidana kekerasan seksual pasal 13 di Undang-Undang terkait hukuman kejahatan kekerasan seksual dan perlindungan korban disebutkan hukuman tentang perilaku tidak senonoh di ruang publik yang hanya akan dihukum penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari 3 juta won.³⁶

³⁴ Ibid.

³⁵ “Daeryun Law Firm.”

³⁶ “Pusat Penerangan Hukum Nasional Korea Selatan.”

tindakan tidak senonoh yang mereka alami, masyarakat malah menyalahkan korban. Ketakutan tidak didengar dan budaya menyalahkan korban adalah alasan utama yang menghentikan korban untuk melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami.³⁹

Atas dasar rasa sakit bersama akan sistem sosial yang merugikan perempuan di tengah masyarakat yang misogini, solidaritas pun terkumpul dalam tujuan yang sama. Untuk dapat mengungkap ketidakadilan struktural yang telah terjadi ini dan untuk dapat membuat tuntutan secara nyata maka diperlukan solidaritas yang besar dan dukungan dalam isu kekerasan dan pelecehan seksual ini.⁴⁰ Gerakan #MeToo ini pun memberi tempat masyarakat dalam menyuarakan tuntutan untuk mengubah kebijakan atas isu kekerasan dan pelecehan seksual ini sekaligus memberi kesadaran dan edukasi bagi masyarakat luas terkait diskriminasi gender yang masih ada di tengah masyarakat.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Realmeter, aksi gerakan #MeToo ini mendapat sebanyak 74,8% dukungan penuh dari masyarakat yang memiliki kekhawatiran yang sama terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

semakin memantik para korban kejahatan seks untuk ikut meminta keadilan.⁴⁵

Setelah pengakuan Seo Ji Hyun, beberapa perempuan kemudian juga ikut mengungkapkan pengalaman buruk mengalami kekerasan dan pelecehan seksual di hadapan publik. Tuduhan ini dilayangkan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan terkenal seperti seperti penyair Ko Un, yang disebut-sebut sebagai kandidat Hadiah Nobel Sastra, dan sutradara Lee Yun-taek, ayah dunia teater Korea. Gerakan #MeToo juga telah menyebar ke dunia politik dimana mantan Gubernur Ahn Hee Jung juga tidak luput dari tuduhan kasus kekerasan seksual terhadap sekretarisnya.⁴⁶

Aksi seo ji hyun ini berhasil mempertahankan perhatian publik pada isu pelecehan dan kekerasan seksual ini. Ia memanfaatkan momentum yang diberikan oleh gerakan #MeToo yang sedang hangat di masyarakat lalu mempertahankan fokus masyarakat kepada kasus nyata dari isu pelecehan dan kekerasan seksual. Fakta bahwa bahkan jaksa penuntut tinggi, yang dianggap berada di puncak struktur kekuasaan sosial tidak luput terkena kekerasan seksual hanya karena mereka adalah perempuan segera mendatangkan lebih banyak keprihatinan dan simpati.⁴⁷

Ketika publik semakin terkejut dengan pengakuan Seo Ji Hyun, isu diskriminasi gender yang telah mengakar dalam sistem sosial

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Women News, "Let's Break down the Words Blocking #MeToo" Citizens Threw off the Black Cloth."

⁴⁷ Ibid.

masyarakat Korea Selatan didorong paksa ke permukaan. Ini membentuk aksi yang tidak cukup dengan diskusi digital saja namun telah didorong untuk melakukan aksi nyata dengan turun ke jalan.

Terdapat ribuan pria dan wanita turun ke jalan, mengecam budaya misogini dan kejahatan seksual dan bentuk kekerasan lain yang diderita pria dan wanita Korea setiap hari dengan menyalahkan kebencian terhadap wanita yang mengakar kuat di negara tersebut. Beberapa protes dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan organisasi yang memiliki tujuan yang sama yaitu mengubah kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini.

Salah satu contoh aksi protes yang dilakukan oleh Asosiasi yang bergerak pada hak asasi manusia di Korea Selatan yaitu *Civic Action Together* di Sewoon Plaza pada tahun 2018 lalu menarik banyak perhatian. Aksi protes yang dihadiri oleh 200 orang itu kompak berpakaian serba hitam dan berbalut kain hitam dan mulai berbaris sambil membawa papan yang berisikan kata-kata dari masyarakat Korea yang mencegah perempuan berbicara meskipun mereka mengalami seksisme dan kekerasan seksual seperti ‘apakah anda benar menjadi korban?’, ‘mengapa dia tidak mengatakan tidak?’, dan sebagainya.⁴⁸

⁴⁸ Women News, “Let’s Break down the Words Blocking #MeToo” Citizens Threw off the Black Cloth.”

Respon tanggap dari pemerintah Korea Selatan yang patut disorot dalam menanggapi demonstrasi dan tuntutan besar-besaran dari gerakan #MeToo ini. Presiden Moon Jae In yang memerintah Korea Selatan pada waktu itu bereaksi cepat terhadap gerakan #MeToo dengan menyerukan gerakan #MeToo sebagai budaya baru yang bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Ia pun menyebutkan bahwa adanya gerakan #MeToo ini dapat memimpin Korea menuju masyarakat di mana kesetaraan seksual dan hak-hak perempuan diwujudkan dan martabat semua orang dihormati.⁵⁰

Dalam tiga bulan setelah pengungkapan Jaksa Seo Ji Hyun, sebanyak lebih dari 100 rancangan undang-undang diajukan ke Majelis Nasional Korea dan sepeuluh undang-undang #MeToo telah disahkan pada akhir tahun 2018. Undang-undang yang diumumkan pada tanggal 16 oktober ini disebut 'Me Too Act', yang bertujuan untuk memperkuat hukuman untuk kejahatan kekerasan seksual tipe kekuasaan.⁵¹

Pemerintah Korea Selatan sendiri telah menambahkan beberapa ketentuan baru ke dalam Undang-Undang Dukungan Kesempatan Kerja yang Setara dan Keseimbangan Pekerjaan-Keluarga (UU EEO), yang

⁵⁰ Song Seung Hyun, "More than 70% of Women in Film Biz Experience Sexual Violence, Harassment."

⁵¹ BBC, "Perubahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat Korea Selatan Setelah Gerakan #MeToo Tahun 2018."

mencakup hukuman yang lebih keras bagi pelaku dan denda yang lebih tinggi.⁵²

Terdapat beberapa revisi penambahan hukuman bagi tindakan kejahatan seksual sesuai tipenya. Pertama, hukuman perilaku tercela melalui kekuasaan atau pekerjaan hierarkis akan ditingkatkan dari “penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari 5 juta won” menjadi “penjara tidak lebih dari 3 tahun atau denda tidak lebih dari 15 juta won”. Kedua, hukuman untuk perzinahan dengan kekuatan atau kekuasaan hierarkis yang hukuman awalnya “tidak lebih lima tahun denda tidak lebih dari 15 juta won” menjadi “hingga tujuh tahun penjara atau denda tidak lebih dari 30 juta won”. Kemudian, seseorang yang telah diberhentikan, diberhentikan, atau dijatuhi hukuman atau masa percobaan karena pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur tidak dapat diangkat secara permanen ke jabatan publik.⁵³

Pemerintah Korea Selatan kemudian memperkenalkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mencegah korban pelecehan seksual dituntut karena pencemaran nama baik hingga persidangan kasus pelecehan seksual selesai, dan untuk mencegah kerusakan sekunder selama proses persidangan. RUU juga telah disiapkan untuk memastikan bahwa negara mensubsidi biaya penghapusan video online

⁵² Zurayda Enggar Kusuma, “Transnational Advocacy Network Strategies Of #MeToo Movement In Influencing The Policy Change Regarding The Issue Of Sexual Harassment In South Korea,” 42.

⁵³ “Laman Resmi Kementerian Kesetaraan Gender Dan Keluarga.”

ilegal, atau tanpa syarat mengungkapkan identitas pelaku pemerkosaan atau penyerangan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur.⁵⁴

Terdapat pula RUU untuk menambah undang-undang pembatasan untuk perzinahan dan tindakan tidak senonoh oleh hierarki bisnis dan kekuasaan dengan memperhitungkan fakta bahwa sulit untuk melaporkan kasus pelecehan dan kekerasan seksual jika berada di bawah dominasi seperti kasus yang dialami Jaksa Seo Ji Hyun oleh atasannya yaitu Ahn Hee Jung agar kasus dengan tipe yang sama seperti ini dapat dicegah.⁵⁵

Tidak hanya itu, pemerintah Korea Selatan mengesahkan undang-undang kesejahteraan artis dimana ini adalah sebuah peraturan baru yang diperkenalkan dalam undang-undang yang mewajibkan negara bagian dan pemerintah daerah untuk menyiapkan kebijakan dalam melindungi seniman dari pelecehan dan kekerasan seksual. Jika ada kasus dimana seorang seniman menggunakan kuasa yang Ia miliki untuk memaksa seniman lain melakukan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak, maka akan dikenakan sanksi seperti denda sesuai dengan Peraturan Monopoli dan Undang-Undang Perdagangan yang Adil.⁵⁶

Pemerintah Korea Selatan memiliki fokus utama dalam menanggapi gerakan #MeToo yaitu pertama adalah menciptakan lingkungan di mana orang dapat berbicara tanpa takut dirugikan di

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ “Pusat Penerangan Hukum Nasional Korea Selatan.”

tempat kerja. Gerakan #MeToo berbicara dalam bahasa korban tentang 'kekerasan seksual tipe kekuasaan' dan 'seksisme struktural sosial' yang lazim di masyarakat, dan pemerintah menciptakan suasana di mana untuk berbicara terlebih dahulu, dan memungkinkan organisasi untuk mensistematisasikan tindakan tersebut secara menyeluruh. bahwa mereka tidak mengulangi diri mereka sendiri, melihat bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan. Sektor publik, tempat kerja swasta, sekolah, dan lingkaran budaya/seni menjadi sasaran inspeksi khusus untuk memastikan bahwa sistem tindakan disipliner dan pemulihan bagi pelaku berfungsi dengan baik, dan korban dapat melaporkan dengan percaya diri tanpa takut kerusakan sekunder. Sebuah pusat pelaporan khusus sedang dioperasikan untuk setiap bidang.⁵⁷ Berkaitan dengan ini, pemerintah Korea Selatan juga telah mendorong pendidikan tentang peningkatan sensitivitas kesetaraan gender dari lembaga investigasi seperti polisi sehingga mencegah kerusakan sekunder bagi korban.⁵⁸

Sistem tanggap dan penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual juga menjadi fokus pemerintah nasional dan daerah. Secara khusus, kota metropolitan seperti Seoul, Gwangju, dan Gyeonggi-do sedang menanggapi isu kekerasan seksual dengan memperkuat sistem tanggapan dengan membentuk organisasi baru yang didedikasikan untuk pelaporan korban kekerasan dan pelecehan seksual. Tindakan

⁵⁷ “Laman Resmi Kementerian Kesetaraan Gender Dan Keluarga.”

⁵⁸ Ibid.

tersebut dianggap sebagai standar referensi penting bagi pemerintah daerah lainnya dalam menanggapi kekerasan dan pelecehan seksual di wilayah masing-masing.⁵⁹

Gerakan #MeToo dengan ini dapat dikatakan berhasil untuk menyatukan kekhawatiran individu atas isu kekerasan dan pelecehan seksual menjadi sebuah solidaritas kuat untuk membawa perubahan bagi masyarakat luas. Gerakan #MeToo sebagai gerakan sosial nyatanya telah mampu untuk berkomunikasi lintas batas dan mengembangkan keluhan bersama.

Menurut Tirrell, bahasa dapat menjadi alat penindasan dalam masyarakat androsentris, tetapi ini juga dapat merekonstruksi kategori sosial dan normativitas yang ada sehingga dapat menjadi medan perjuangan politik.⁶⁰ Dalam hal itu, gerakan #MeToo berani mengekspresikan pernyataan ‘saya adalah korban’ dan kata-kata yang menguatkan bagi wanita lain yang ikut mendukung simpatisan. Hal tersebut yang kemudian juga mendorong keberhasilan gerakan #MeToo secara signifikan dibanding gerakan yang pernah ada di Korea Selatan.

Gerakan #MeToo terbukti membawa perubahan tidak hanya dari segi kebijakan dan undang-undang terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual namun juga membawa perubahan dalam sosial

⁵⁹ Busan Women and Family Development Institute, “Study on Efficient Operation of the Sexual Violence Response System after #MeToo Movement” (2019): 13–14.

⁶⁰ Tirrell Lynne, “‘Genocidal Language Games 1’, in Ishani Maitra, and Mary Kate McGowan (Eds),” *Speech and Harm: Controversies Over Free Speech* (2012).

masyarakat di Korea Selatan. Gerakan #MeToo utamanya mengubah budaya menyalahkan korban dalam mengurangi ‘stigma sosial’ bagi korban kekerasan seksual. Aksi ini juga menambah kesadaran terkait isu pelecehan dan kekerasan seksual yang bersifat verbal maupun non verbal. Hal ini terbukti bahwa setelah aksi gerakan #MeToo lelucon seksual dan kata-kata serta tindakan yang merendahkan martabat terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 52%.⁶¹ Ini menunjukkan bahwa gerakan #MeToo telah membuat budaya tempat kerja menjadi lebih sehat, dan tidak hanya wanita, tetapi juga para eksekutif dan pria telah menyadari pentingnya mencegah tindakan pelecehan seksual.

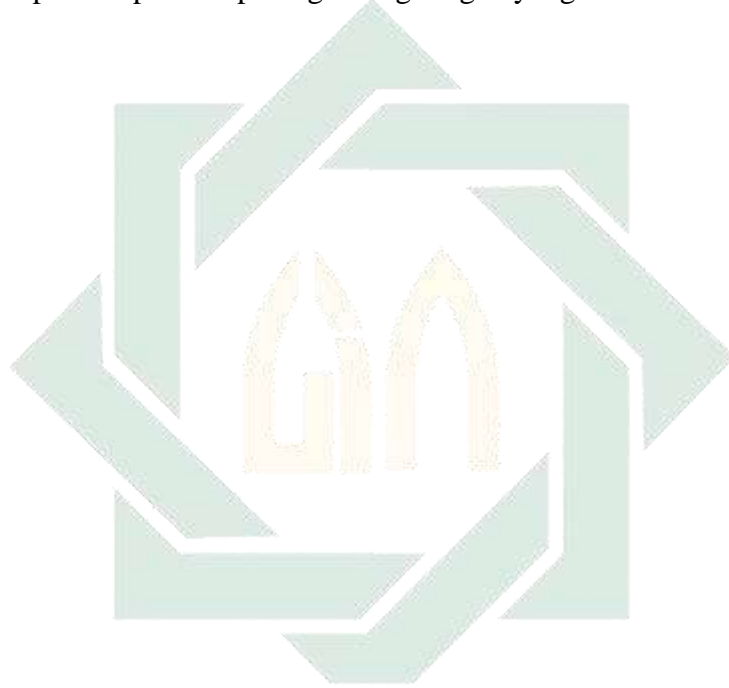
Gerakan #MeToo mengubah sistem dalam mempermudah proses peradilan bagi korban kekerasan seksual dan menuntut agar pelaku kekerasan dan pelecehan seksual ini dapat terjerat hukuman yang setimpal agar tidak mengulangi aksinya lagi di kemudian hari. Dengan perubahan kebijakan dan penambahan hukuman untuk para pelaku ini diharapkan tidak hanya memiliki efek yudisial untuk menyelamatkan korban dari pelaku, namun juga menolong korban dalam meningkatkan kesehatan mentalnya.⁶²

Namun tugas gerakan #MeToo tidak berhenti sampai disitu saja. Diperlukan pengawasan terhadap janji pemerintah dan pengawalan agar

⁶¹ Park Da Hae, “Sexual Jokes in the Workplace Have Declined since the #MeToo Movement.”

⁶² Ibid.

rancangan yang sudah dibuat pemerintah dapat terjadi secara nyata dalam praktiknya. Sehingga tugas gerakan #MeToo ini tidak akan pernah berhenti sampai masyarakat Korea Selatan khususnya kaum perempuan dapat hidup dengan lingkungan yang aman.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gerakan #MeToo berperan penting dalam membawa perubahan bagi sistem sosial yang masih tidak menyadari pentingnya isu kekerasan dan pelecehan seksual dan budaya menyalahkan korban di Korea Selatan. Gerakan ini juga memaksa perubahan dalam mendobrak stigma korban pelecehan dan kekerasan seksual yang masih berlaku di masyarakat Korea Selatan.

Gerakan #MeToo memiliki dua peran penting dalam mengubah kebijakan terkait kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan yaitu sebagai aktor yang membawa perubahan dan sebagai aktor yang dapat memberikan suara politik kepada mereka yang dicabut haknya. Gerakan #MeToo kemudian berhasil menyambungkan suara tuntutan korban kekerasan dan pelecehan seksual untuk di dengar oleh pemerintah pusat Korea Selatan. Desakan gelombang masyarakat yang masif, membuat pemerintah pusat mengambil tindakan cepat dengan mengusulkan sejumlah RUU terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual dan hak-hak korban lainnya. Penambahan hukuman terkait maksimal tahun penjara dan denda untuk beberapa kasus pelecehan dan kekerasan seksual juga di tambahkan oleh pemerintah Korea Selatan.

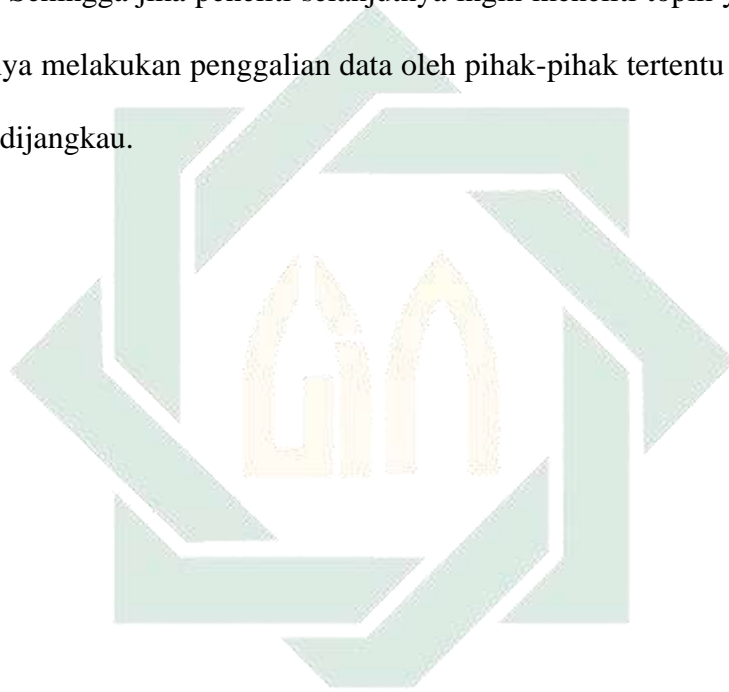
Dengan demikian, gerakan #MeToo ini terbukti berhasil mengubah kebijakan hukum Korea Selatan terkait kekerasan dan pelecehan seksual.

Selain efek yudisial, gerakan #MeToo juga berperan penting dalam mengubah alur sosial budaya di Korea Selatan dengan menyebarkan wacana betapa pentingnya isu kekerasan dan pelecehan seksual di tengah masyarakat untuk mengedukasinya terkait hak-hak perempuan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis hendak memberikan saran kepada pemerintah Korea Selatan dan Peneliti selanjutnya. Bagi pemerintah Korea Selatan sebaiknya segera menepati janjinya dengan mengesahkan beberapa RUU yang masih ditunda agar perempuan di Korea Selatan dapat hidup dan berproduktifitas di lingkungan yang aman. Selain itu, sebagai pemangku kebijakan pemerintah Korea Selatan memiliki tanggung jawab besar untuk terus berusaha memberikan perlindungan bagi warganya yaitu dengan memantau program-program seperti organisasi pengaduan korban pelecehan seksual dan pusat konseling korban yang telah dibuat pemerintah nasional dan pemerintah daerah sendiri. Bagi Peneliti yang akan memilih topik yang sama, Penelitian ini dilakukan peneliti dengan keterbatasan bahasa yang menjadi masalah terbesar peneliti. Sebenarnya, Peneliti telah mencoba mengajukan wawancara kepada 5 asosiasi dan organisasi yang mendukung Gerakan #MeToo di Korea Selatan yaitu *Asosiasi Pekerja Perempuan Korea, Persatuan Asosiasi Wanita Korea, Pusat Bantuan Kekerasan Seksual Korea, Asosiasi Wanita Korea, dan Hotline Wanita Korea*. Dari 5 lembaga tersebut, hanya 3 yang menjawab yaitu *Asosiasi Pekerja Perempuan Korea,*

Persatuan Asosiasi Wanita Korea, Pusat Bantuan Kekerasan Seksual Korea. Namun, ketiga asosiasi tersebut mengatakan tidak dapat menyanggupi permintaan wawancara peneliti karena kendala jarak dan bahasa. Sehingga jika peneliti selanjutnya ingin meneliti topik yang sama, sebaiknya melakukan penggalian data oleh pihak-pihak tertentu yang lebih mudah dijangkau.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Cresswell, J. *Research Disig: Qualitative & Quantitative Aooriaches*. CA: Sage Publication, 1998.
- Mas'oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Jackson, Robert & Georg Serensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori Dan Pendekatan*. Terj. Dadan Suryadipura & Pancasari Suyatiman. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Kewley, Stephanie and Charlotte Barlow. *Preventing Sexual Violence: Problems and Possibilities*. Bristol University Press, 2020.
- Kusuma, Zurayda Enggar. "Transnational Advocacy Network Strategies Of #Metoo Movement In Influencing The Policy Change Regarding The Issue Of Sexual Harassment In South Korea." Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Tandon, Neeru. *Feminine Psyche-A Post Modern Critique*. Atlantic Publisher & Dist, 2008.

Artikel/Jurnal/Skripsi

- Ahuja, Manju K., Pankaj Patel, and Ayoung Suh. "The Influence of Social Media on Collective Action in the Context of Digital Activism: An Affordance Approach." *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences* 2018-Janua, no. January (2018).
- Bahri, Mohammad Thoriq. "Twitter Based Digital Social Movement Pattern to Fight COVID-19." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2021): 95.
- Bhattacharyya, Rituparna. "#MeToo Movement: An Aeareness Campaign. International." *Journal of Innovation, Creativity and Change* 3, no. 4 (2018).
- Chandra, Giti and Irma Erlingsdóttir. *The Routledge Handbook of the Politics of The# Metoo Movement*. Berilustra. Routledge, 2020.
- Choon, Chang May. "High-Profile #MeToo Case in South Korea Throws the Spotlight on Attitudes towards Women in the Country."
- Dewi, Fenni Ratna. *Pengaruh Gerakan #MeToo Terhadap Perubahan Kebijakan Tentang Pelecehan Seksual Di Amerika Serikat Tahun 2017-2019*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Emmanue, Anniamma. "Feminist Movements In Global Perspective United Nations & The Rights Of The Women", Indian Political Science Associatio."

- The Indian Journal of Political Science* 71, no. 3 (2010).
- EEOC. "What Is Sexual Harassment; EEOC ;Terminologies. What Is Sexual Harassment; EEOC ;Terminologies." *U.S. Equal Employment Opportunity Commission* 3, no. 1 (2019).
- Hasunuma, Linda, and Ki young Shin. "#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou." *Journal of Women, Politics and Policy* 40, no. 1 (2019).
- Hutabarat, Femi Triastia and Anggun Puspitasari. "Dampak Gerakan Feminis Transnasional # MeToo Terhadap Awareness Perempuan India." *Balcony* 3, no. 2 (2019).
- Kardina and Anisa Marlinda Yurisa. "Analisis Gender Based Violence Dalam Konvensi Cedaw Pada Isu Kekerasan Seksual Di Korea Selatan." *Ilmu Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2021).
- Kavada, Anastasia. "Creating the Collective: Social Media, the Occupy Movement and It's Constitution as a Collective Actor." *Information, Communication & Society* 18, no. 8 (2015).
- Kim, Jinsook. "The Resurgence and Popularization of Feminism in South Korea: Key Issues and Challenges for Contemporary Feminist Activism." *Korea Journal* 61, no. 4 (2021).
- Klot, Jennifer, Pam Delargy, and T Turmen. "What Is Sexual Violence ? Fa c t S h e e t What Is Sexual Violence ?" *Violence Against Women* 82 (2003).
- Kyung-Ai Kim. "Nationalism: An Advocate of, or a Barrier to, Feminism in South Korea, Women's Studies International Forum" 19, no. 2 (1996).
- Larsen, Chris. "#MeToo in South Korea : A Comparative Analysis of Feminist Perspectives in a Cultural Context." *International Journal of Foreign Studies* 11, no. 2 (2018).
- Lee, Hee-Eun. "Feminist Activism and Media Ethics - Exploring the Relationship between #MeToo Movement and Media." *Journal of communication research* 55, no. 3 (2018).
- Lynne, Tirrell. "'Genocidal Language Games1', in Ishani Maitra, and Mary Kate McGowan (Eds)." *Speech and Harm: Controversies Over Free Speech* (2012).
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014).
- Pambouc, Asya. "The Globalization of the Me Too Movement: The Case Study of South Korea." *The Globalization of the Me Too Movement*, no. May (2019).
- Rakhmadhani, Haldhianty Fitri, Sukma Sushanti, and A.A Bagus Surya Widya Nugraha. "Upaya Gerakan Me Too Mengurangi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di India Tahun 2018." *Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2020).
- Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

- Fight COVID-19” (2021): 95–112.
- BBC. “Perubahan Yang Terjadi Dalam Masyarakat Korea Selatan Setelah Gerakan #MeToo Tahun 2018.”
- Blegeberg, Inger Helene Johnsen. “#MeToo in South Korea and Japan – a Comparative Study of Newspapers’ Coverage of the MeToo-Movement in South Korea and Japan” (2020).
- Busan Women and Family Development Institute. “Study on Efficient Operation of the Sexual Violence Response System after #MeToo Movement” (2019): 13–14.
- CBS NEWS. “#MeToo Reaches 85 Countries with 1,7M Tweets.”
- Chang May Choon. “High-Profile #MeToo Case in South Korea Throws the Spotlight on Attitudes towards Women in the Country.”
- Cresswell, J. *Research Disig: Qualitative & Quantitative Aooriaches*. CA: Sage Publication, 1998.
- Easylaw.go. “Easy-to-Find Lifestyle Laws - Victims of Sex Crimes.”
- EEOC. “What Is Sexual Harassment; EEOC ;Terminologies. What Is Sexual Harassment; EEOC ;Terminologies.” *U.S. Equal Employment Opportunity Commission* 3, no. 1 (2019): 1–4. <https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatish.pdf>.
- Eka Safitri Minabari. “Strategi Gerakan #MeToo Dalam Melawan Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Korea Selatan.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Erliana Hasan. *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: grafika Indonesia, 2011.
- Federal Ministry of Justice and the Federal Office of Justice. “The Act to Promote Transparency in Wage Structures among Women and Men.”
- Federation of Korea Trade Unions. “Types of Sexual Harassment in the Workplace, ‘boss Making Sexual Jokes during Dinner’ the Most.”
- Fenni Ratna Dewi. *Pengaruh Gerakan #MeToo Terhadap Perubahan Kebijakan Tentang Pelecehan Seksual Di Amerika Serikat Tahun 2017-2019*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Giti Chandra and Irma Erlingsdóttir. *The Routledge Handbook of the Politics of The# Metoo Movement*. Berilustra. Routledge, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fREIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=me+too+movement+history&ots=X78UfYjegov&sig=5HZaK1qPt5WOkbXv8TDOKCxhrnw&redir_esc=y#v=onepage&q=me+too+movement+history&f=false.
- Hasunuma, Linda, and Ki young Shin. “#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou.” *Journal of Women, Politics and Policy* 40, no. 1 (2019): 97–111.

- Hee-Eun Lee. "Feminist Activism and Media Ethics - Exploring the Relationship between #MeToo Movement and Media." *Journal of communication research* 55, no. 3 (2018): 120.
- Hong Ji In. "The Most Tweeted Word in the Domestic Social Sector This Year Is 'School Me Too.'"
- Hutabarat, Femi Triastia, and Anggun Puspitasari. "Dampak Gerakan Feminis Transnasional # MeToo Terhadap Awareness Perempuan India." *Balcony* 3, no. 2 (2019): 135–143.
- Isnawaty Endarsih. "Peran Gerakan Women's Forum Australia (WFA) Terhadap Sexual Harassment Dan Sexual Violence Pada Perempuan Di Australia." Universitas Muhamaddiyah Malang, 2014.
- Jason Strother. "South Korea's #MeToo Movement Challenges Workplace Sexual Harassment."
- Jörg Balsiger. "Transnational Social Movement". *Encyclopedia Britannica*."
- K-indicator Sistem. "Tingkat Kriminalitas."
- Kardina, and Anisa Marlinda Yurisa. "Analisis Gender Based Violence Dalam Konvensi Cedaw Pada Isu Kekerasan Seksual Di Korea Selatan." *Ilmu Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2021): 156–170.
- Kim Hae Sun. "The #MeToo Movement Reveals the Limits of Sexual Violence Prevention Policy."
- Kim, Jinsook. "The Resurgence and Popularization of Feminism in South Korea: Key Issues and Challenges for Contemporary Feminist Activism." *Korea Journal* 61, no. 4 (2021): 75–101. https://www.researchgate.net/publication/357714828_The_Resurgence_and_Popularization_of_Feminism_in_South_Korea_Key_Issues_and_Challenges_for_Contemporary_Feminist_Activism/link/61dc5504034dda1b9eea7492/download.
- Klot, Jennifer, Pam Delargy, and T Turmen. "What Is Sexual Violence ? Fa c t S h e e t What Is Sexual Violence ?" *Violence Against Women* 82 (2003): 411–418.
- Kukmin Daily. "40% Siswa Sekolah Menengah 'Ada Pelecehan Seksual Di Sekolah Oleh Guru' Investigasi Komisi Hak Asasi Manusia."
- Kyung-Ai Kim. "Nationalism: An Advocate of, or a Barrier to, Feminism in South Korea, *Women's Studies International Forum*" 19, no. 2 (1996): 1–2.
- Larsen, Chris. "#MeToo in South Korea: A Comparative Analysis of Feminist Perspectives in a Cultural Context." *International Journal of Foreign Studies* 11, no. 2 (2018): 39–59.
- Leon Valentin Schettler. "Socializing Development: Transnational Social Movement Advocacy and the Human Rights Accountability of Multilateral Development Banks." *Bielefeld: transcript Verlag* 1, no. 2 (2020): 17–24.

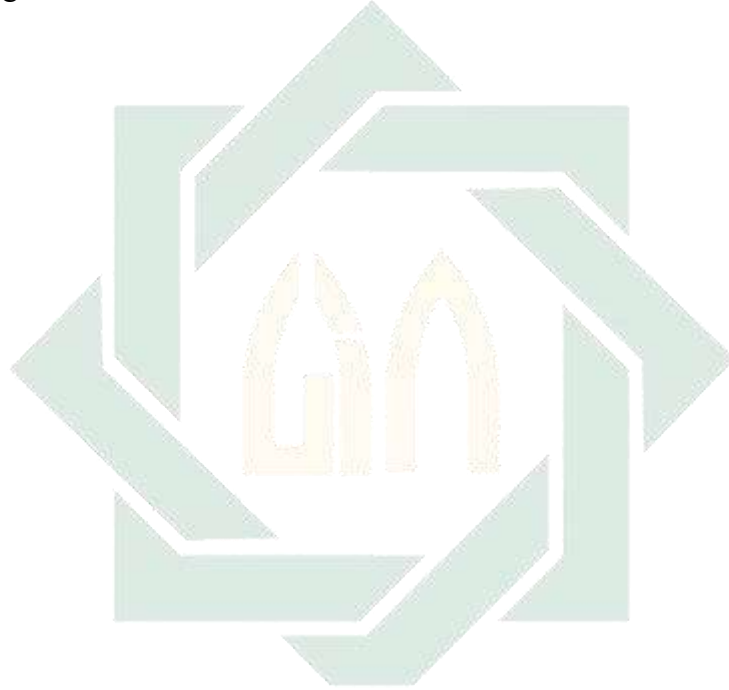
- Lexy J Moleong. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Little, William. *Introduction to Sociology - 2nd Canadian Edition*. <https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/>, 2016. <http://doer.col.org/handle/123456789/5674>.
- Melissa Y. Rock. "Transnational Social Movement." *GEOG 128: Geography of International Affairs*.
- Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Nasional Kementrian Perundang-undangan Pemerintah Korea Selatan. "Hukum Kriminal."
- Neeru Tandon. *Feminine Psyche-A Post Modern Critique*. Atlantic Publisher & Dist, 2008.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–181.
- Oh Se Jin. "38.6% of Women in Korea Have Experienced Sexual Violence..Serious Increase in Digital Sex Crimes."
- Oh Soo Jin. "The Spreading 'Me Too' Movement...SNS Public Opinion 'Active Support' Prevails."
- Pambouc, Asya. "The Globalization of the Me Too Movement: The Case Study of South Korea." *The Globalization of the Me Too Movement*, no. May (2019): 1–23. https://www.researchgate.net/publication/332936632_The_Globalization_of_the_Me_Too_Movement_The_Case_Study_of_South_Korea/citations.
- Park Da Hae. "Sexual Jokes in the Workplace Have Declined since the #MeToo Movement."
- Park Tae in. "3 Million Tweets in 7 Days, 'School Me Too' of Anger...Started at Chungbuk Girls Middle School."
- PR Times. 2018. "English Word of the Year for 2018, 'Me Too.'"
- Rakhmadhani, Haldhianty Fitri, Sukma Sushanti, and A.A Bagus Surya Widya Nugraha. "Upaya Gerakan Me Too Mengurangi Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di India Tahun 2018." *Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2020): 1–10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/56971>.
- Realmeter. "Pelecehan Seksual Dan Penyerangan Gerakan Me-Too, 74,8% Mendukung vs 13,1% Menentang."
- Rituparna Bhattacharyya. "#MeToo Movement: An Awareness Campaign. International." *Journal of Innovation, Creativity and Change* 3, no. 4 (2018): 4.
- Robert Jackson & Georg Serensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*:

- Teori Dan Pendekatan. Terj. Dadan Suryadipura & Pancasari Suyatiman.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Sarah Delaney McDougall. "Defining Feminism: A Phenomenological Exploration of the Meaning Women Assign to Their Feminist Identities." North Dakota State University, 2013.
- Sen, Purna. "#MeToo: Headlines from a Global Movement" (2020): 4. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/brief-metoo-headlines-from-a-global-movement#view>.
- Smith, Jackie. "Transnational Social." *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (2013).
- Song Seung Hyun. "More than 70% of Women in Film Biz Experience Sexual Violence, Harassment."
- Stephanie Kewley and Charlotte Barlow. *Preventing Sexual Violence: Problems and Possibilities.* Bristol University Press, 2020.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- The Diplomat. "How Feminism Became a Dirty Word in South Korea."
- Time.com. "How #MeToo Is Taking on a Life of Its Own in Asia."
- Tirrell Lynne. "'Genocidal Language Games1', in Ishani Maitra, and Mary Kate McGowan (Eds)." *Speech and Harm: Controversies Over Free Speech* (2012).
- True, Jacqui. "Feminism and Gender Studies in International Relations Theory." *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, no. March 2010 (2010): 1–22.
- UN WOMEN. "Facts and Figures: Ending Violence against Women."
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "Sexual Violence."
- Voa News. "South Korea's #MeToo Movement Challenges Workplace Sexual Harassment."
- Women News. "Let's Break down the Words Blocking #MeToo" Citizens Threw off the Black Cloth."
- World Health Organization and Pan American Health Organization. "Understanding and Addressing." *Violence against Women: Sexual Violence* (2013): 1.
- Zurayda Enggar Kusuma. "Transnational Advocacy Network Strategies Of #Metoo Movement In Influencing The Policy Change Regarding The Issue Of Sexual Harassment In South Korea." Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- "Council of Europe."

“Daeryun Law Firm.”

“Laman Resmi Kementrian Kesetaraan Gender Dan Keluarga.” *년 성희롱
실태조사 결과 발표 (Pengumuman Hasil Survei Pelecehan Seksual Tahun
2018).*

“Pusat Penerangan Hukum Nasional Korea Selatan.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A